

**TESTAMENT ERFSTELLING PADA ANAK ANGKAT YANG  
DITUNJUK SEBAGAI AHLI WARIS SATU-SATUNYA  
(Studi Kasus Surat Wasiat Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996  
di Tebing Tinggi, Deli)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**UNGGAR PRAMITA SARI  
NIM 145010100111043**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

## SKRIPSI

*TESTAMENT ERFSTELLING* PADA ANAK ANGKAT YANG  
DITUNJUK SEBAGAI AHLI WARIS SATU-SATUNYA  
(Studi Kasus Surat Wasiat Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996  
di Tebing Tinggi, Deli)

Unggar Pramita Sari  
NIM. 145010100111043

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal  
..... dan disahkan pada tanggal .....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Prof. Dr. Suhariningsih,SH,MS**  
NIP. 195005261980022001

**Diah Pawestri Maharani,SH.,MH**  
NIK. 0023078305

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Perdata

**Dr. Rachmad Safa'at, SH., Msi**  
NIP. 19620805198802 1 001

**Dr. Budi Santoso, SH., LL.M**  
NIP. 19720622200501 1 002

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,

Yang Menyatakan,

**Unggar Pramita Sari**

NIM: 145010100111043



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat memenuhi program sarjana. Tugas akhir tersebut merupakan penelitian yang berjudul *TESTAMENT ERFSTELLING PADA ANAK ANGKAT YANG DITUNJUK SEBAGAI AHLI WARIS SATU-SATUNYA* (Studi Kasus Surat Wasiat Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 di Tebing Tinggi, Deli).

Penelitian dapat penulis selesaikan hingga tahap akhir tentunya atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak , untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rachmat Safaat, SH,, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, Sh., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Prof. Dr. Suhariningsih, SH., MS dan Diah Pawestri , SH., MH selaku dosen pembimbing.
4. Natalia Christiana , SH., Mkn , selaku Notaris dan PPAT di Malang, Ricci Antarbudaya , SH., Mkn , Muh. Zulfan, SH, Dhimas Reza Rifai, S.Sy.,S.H, Endah Lestari, SE, Anik Retnowati, Wahyu Nugroho selaku pegawai Notaris dan PPAT.
5. Kedua orang tua penulis yaitu Buari dan Kusnanik beserta keluarga penulis yaitu kakak kakak penulis, Neny Chuinda, Wiwit Arianto dan Ria

Tri Andayani, beserta keponakan keponakan penulis yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

6. Teman dan Sahabat terkasih penulis yaitu Chandra Kurniawan Seputro, SE, Antike Ayu, SH Yulia Citra Malinda ,SH, Hening Hana ,SH , Aditya Dharma, SH , Alvino Bimo, Perdana Adinata, SH, Iman Lutfianto, SH , Chikita Murti, SH, Gracia Jasmine, SH , Bramantya Bimo, Wildan K Ridho, Hary Stiawan, Nabila Rahmawati dan Yuristia yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian hingga tahap akhir.
7. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang senantiasa membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir.
8. Pihak pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam hal ini penulis menjabarkan analisis terkait dengan permasalahan hukum yang berangkat dari adanya *testament erfstelling*. Dalam analisis tersebut tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dan kesalahan baik dalam penulisan maupun isi dari analisis itu sendiri, maka dari itu kritik dan saran sangat berharga bagi penulis untuk memperbaiki tugas akhir ini.

Semoga tulisan penulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan pertimbangan serta acuan dalam membuat penelitian lain maupun dalam penyelesaian permasalahan hukum. Akhir kata penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini.

Malang, Oktober 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Dafta Isi .....	v
Ringkasan .....	vi
Summary .....	vii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Tentang Sistem Kewarisan di Indonesia .....	12
B. Kajian Tentang <i>Testament</i> Berdasarkan <i>Burgerlijk Wetbook</i> .....	16
C. Kajian Tentang <i>Testament Erfstelling</i> .....	19
D. Kajian Tentang Ahli Waris .....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Jenis Bahan Hukum .....	33
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	34
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	35
F. Definisi Konseptual .....	36

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Analisis Penyebab <i>Testament Erfstelling</i> No 4 Tanggal 13 Juli Tidak Dapat Dilaksanakan .....	37
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Dapat Dilaksanakannya <i>Testament Erfstelling</i> Pada Anak Angkat yang Ditunjuk Sebagai Ahli Waris Satu Satunya .....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## RINGKASAN

Unggar Pramita Sari, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2018, **TESTAMENT ERFSTELLING PADA ANAK ANGKAT YANG DITUNJUK SEBAGAI AHLI WARIS SATU-SATUNYA (Studi Kasus Surat Wasiat Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 di Tebing Tinggi, Deli)**, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., MS dan Diah Prawestri Maharani, SH., MH.

Pada skripsi ini penulis meneliti mengenai salah satu jenis *testament* yang terdapat dalam Burgerlijk Wetbook yang selanjutnya disebut dengan BW. *Testament* yang penulis teliti adalah *testament erfstelling* yang mana isinya menunjuk anak angkat sebagai satu-satunya ahli waris atas seluruh harta peninggalan, tidak hanya sebagai ahli waris namun juga ditunjuk sebagai *executor testamentair*. Berangkat dari *testament erfstelling* No 4 Tanggal 3 Juli 1996 yang dibuat oleh Notaris, di Tebing Tinggi, Deli tidak dapat dilaksanakan, dalam hal ini adalah berkaitan dengan proses balik nama aset yang ada di dalam *testament erfstelling* yang tidak diizinkan oleh kantor pertanahan. Selain itu penulis tidak menemukan ketentuan mengenai pelaksanaan *testament* jenis ini dalam peraturan perundang-undangan terlebih jika subjek yang ditunjuk dalam *testament* adalah anak angkat yang ditunjuk sebagai ahli waris satu-satunya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu: (1) Mengapa *testament erfstelling* Tanggal 13 Juli 1996 tidak dapat dilaksanakan dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya *testament erfstelling* tersebut ?

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menjawab permasalahan tersebut adalah *normative legal research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Dalam hal ini *testament erfstelling* lah yang dijadikan bahan hukum utama dalam penelitian ini serta peraturan perundang-undangan yang diinprestasikan dengan permasalahan yang penulis angkat. Selain itu penulis juga memperhatikan kasus yang penulis angkat dari *Testament erfstelling* No.4 Tanggal 13 Juli 1996, dan pendekatan konsep dengan mengutip beberapa pendapat dari para ahli.

Setelah penelitian dilakukan penulis menemukan fakta-fakta berkaitan dengan subjek dan objek yang terdapat dalam *testament erfstelling* No. 4 tanggal 13 Juli 1996 Terdapat fakta-fakta yang penulis temukan yaitu dari aspek subjektif yaitu kedudukan hukum ahli waris yang merupakan anak angkat yang tidak dapat dibuktikan dengan adanya penetapan pengadilan dan aspek objektif yaitu berkaitan dengan keabsahan dari *testament* itu sendiri yang ternyata pembuatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menyebabkan *testament erfstelling* No 4 Tanggal 3 Juli 1996 tidak dapat dilaksanakan oleh ahli waris.

## SUMMARY

Unggar Pramita Sari, Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, October 2018, *TESTAMENT ERFSTELLING ON ADOPTED CHILDREN APPOINTED AS ONE OF THE ONE HEIRESS* (Case Study Inheritance Letter Number 4 of 13 July 1996 at Tebing Tinggi, Deli), Prof. Dr. Suhariningsih, SH., MS and Diah Prawestri Maharani, SH., MH

In this thesis the author examines one type of testament contained in *Burgerlijk Wetboek*, hereinafter referred to as BW. The testament that the author examines is testament *erfstelling*, in which the contents appoint an adopted child as the only heir to all inheritance, not only as heir but also appointed as the testamentary executor. Departing from testament *erfstelling* No. 4 dated July 3, 1996 made by a Notary, in Tebing Tinggi, Deli cannot be implemented, in this case it is related to the process of registration of the asset in the testament *erfstelling* which is not permitted by the land office. In addition, the author does not find provisions regarding the implementation of this type of testament in the legislation, especially if the subject designated in the testament is an adopted child appointed as the only heir.

Based on the background behind the above, the author raised the formulation of the problem, namely: (1) Why can't testament *erfstelling* on July 13, 1996 be implemented and the factors that cause testament *erfstelling* cannot be performed?

The type of research used by the author in answering these problems is normative legal research, namely research conducted by reviewing the laws and regulations that apply or applied to a particular legal problem. While the research method used is a statute approach or a conceptual and legislative approach. In this case testament *erfstelling* was the main legal material in this study and the legislation that was interpreted with the problems raised by the authors. Besides that the author also pays attention to case study on testament *erfstelling* No.4 Juli 13th 1996, and the concept approach by quoting several opinions from experts.

After the research was conducted the author found the fact that the word relates to the subject and object contained in the testament *erfstelling* No. 4 dated July 13, 1996 There are fact facts that the authors found namely from the subjective aspect of the legal position of heirs who are adopted children that cannot be proven by the establishment of a court and objective aspects that are related to the validity of the testament itself which turns out that the editor is not in accordance with the legislation. This caused testament *erfstelling* No. 4 dated July 13, 1996 could not be carried out by the heir.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Terdapat tiga peristiwa penting dalam kehidupan manusia yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dalam kehidupan tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap makhluk yang hidup pasti akan mati pada suatu hari nanti. Dalam hal peristiwa kematian seseorang pasti menimbulkan akibat hukum bagi segala hal yang ditinggalkannya baik itu adalah orang-orang yang ditinggalkan, yang dalam hal ini kita sebut dengan ahli waris maupun dengan benda yang ditinggalkannya yang dalam hal ini kita sebut dengan objek waris. Peristiwa beralihnya atau diteruskannya barang milik orang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup inilah yang disebut dengan peristiwa waris.

Berangkat dari adanya pluralitas sistem hukum perdata di Indonesia, hal tersebut juga berdampak terhadap salah satu pengaturan dalam hukum perdata yaitu salah satunya adalah waris. Pluralitas sistem hukum perdata tersebut juga menyebabkan sistem hukum yang berbeda pula dalam hal pewarisan di Indonesia. Dalam praktek di Indonesia berlaku tiga sistem hukum yang mengatur tentang hukum waris. Hal tersebut sesuai penggolongan warga negara Indonesia berdasarkan Pasal 163 *Indische Staats regeling* (ILS). Ketiga sistem tersebut yaitu hukum waris perdata barat (BW), hukum waris Islam, dan hukum waris adat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Hukun Perdata di Indonesia**, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2006, hlm. 281.

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta cita (nonmateril) dari generasi satu kepada generasi berikutnya.<sup>2</sup>

Sedangkan hukum waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sumber pokok hukum waris Islam adalah Al-Quran dan Hadist Nabi, Kemudian Qias dan Ijma'.<sup>3</sup>

Kemudian dalam hukum waris perdata barat (BW) pada dasarnya adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>4</sup> Dalam hukum waris perdata barat (BW) berasaskan apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya.<sup>5</sup> Berlakunya asas tersebut yang membedakan sistem hukum waris perdata barat (BW) dengan sistem hukum waris lainnya.

Terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan dalam hukum waris perdata barat (BW) yaitu pewarisan secara *ab intestato* yaitu pewarisan berdasarkan

<sup>2</sup> Iman Hidayat, **Peta Hukum Waris di Indonesia**. Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1989, hlm. 17, dalam Surini dan Nurul, **Hukum Kewarisan Perdata Barat**. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010, hlm. 1.

<sup>3</sup> Iman Sudiyat, *Op.Cit.*, hlm 7 dalam Surini dan Nurul, **Hukum Kewarisan Perdata Barat**. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010, hlm. 2.

<sup>4</sup> A.Pitlo, **Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata**, Terjemahan M.Isa Arief. Jakarta: Intermasa, 1979, hlm 1, dalam Zainudin Ali, **Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 81.

<sup>5</sup> R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1997, hlm 79, dalam Zainudin Ali, **Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 81.

Undang-Undang dan pewarisan secara *testamentair* yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testament*.<sup>6</sup> Dasar hukum waris *testament* terdapat dalam pasal 874 kitab Undang-Undang hukum perdata yang selanjutnya disebut dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak lebih diambil suatu ketetapan yang sah.<sup>7</sup>

Dalam hal membuat *testament*, pewaris pada dasarnya mempunyai kehendak bebas terhadap *testament* yang dibuatnya, karena mengingat harta yang akan ditinggalkan adalah harta pewaris sendiri. Jadi mengenai hal yang akan terjadi pada hartanya setelah pewaris meninggal dunia adalah kehendak penuh dari pewaris, namun untuk melindungi hak dari ahli waris, Undang-Undang telah mengatur bagaimana pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris ketika meninggal dunia, sehingga meskipun ada atau tidak adanya *testament* yang dibuat oleh pewaris, ahli waris berdasarkan Undang-Undang tetap mendapatkan haknya dalam mewaris.

Dalam *testament* sendiri dalam BW terdapat jenis *testament* yang dapat diketahui berdasarkan isinya yaitu *erfstelling* dan *legaat* perbedaan yang mendasar antara *erfstelling* dengan *leegat* adalah terletak pada isinya, *erfstelling* berisi suatu pengangkatan waris yang menghendaki seseorang yang diangkat untuk mewarisi atas seluruh atau sebagian atas harta si pewaris sedangkan *legaat*

---

<sup>6</sup> Surini dan Nurul, **Hukum Kewarisan Perdata Barat**. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010, hlm. 16.

<sup>7</sup> Heni Tanuwidjaja, **Hukum Waris Menurut BW**, Surabaya : Refika Aditama, 2011, hlm 51.

berisi tentang benda jenis tertentu yang diwasiatkan kepada si ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat.

*Testament* yang berisi *legaat* diatur dalam BW pasal 957 yaitu merupakan penetapan wasiat khusus kepada seorang atau lebih untuk memberikan beberapa barang tertentu baik bergerak atau tidak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Sedangkan *testament erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris diatur dalam pasal 954 BW yaitu wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia). Dalam hal ini Penulis fokus pada penelitian *testament erfstelling*, mengingat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah berangkat dari adanya contoh kasus dari *testament erfstelling*. Hal yang menarik dalam *testament* yang berisi *erfstelling* adalah dalam *testament* tersebut berisi bahwa seseorang yang meninggal dunia atau si pewaris menunjuk seseorang atau lebih untuk menjadi ahli waris terhadap seluruh atau sebagian hartanya, ada pula pewaris dalam *testamennya* menyebutkan bahwa ia menunjuk seseorang menjadi satu-satunya ahli waris. *Testament* seperti ini bermakna bahwa pewaris mencabut hak *ab intestato* atau bagian menurut Undang-Undang ahli warisnya. Kenyataannya pada dasarnya wasiat atau *testament* dalam jenis apapun tidak dapat menghapuskan hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang terhadap ahli warisnya dalam hal ini disebut dengan *legitime portie*.

Akibat hukum yang terjadi dalam wasiat atau *testament erfstelling* adalah orang yang menerima *testament* jenis ini mempunyai kedudukan sebagai ahli

waris seperti ahli waris yang lain (ahli waris *ab intestato*).<sup>8</sup> Sehingga dalam peraturan yang terdapat dalam Pasal 955 BW disebutkan konsekuensi dari kedudukan ahli waris tersebut adalah ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat atau *testament erfstelling* berhak memperoleh hak milik atas harta benda si pewaris. Berdasarkan akibat-akibat hukum yang disebabkan oleh adanya pengangkatan ahli waris dalam wasiat atau *testament erfstelling* terdapat beberapa pertanyaan mengenai maksud dan tujuan adanya aturan mengenai *testament* yang demikian dan juga tujuan dari pembuat isi wasiat atau *testament* itu sendiri, mengingat meskipun adanya wasiat atau *testament erfstelling* hal itu tidak akan menghapus hak mutlak ahli waris lainnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang. Selain itu apabila memang sudah terdapat ahli waris yang ditinggalkan oleh si pewaris, mengapa si pewaris masih harus membuat wasiat atau *testament erfstelling* yang isinya mengangkat ahli waris tersebut menjadi ahli waris padahal kedudukan seseorang yang diangkat tersebut adalah sama dengan ahli waris lainnya, dan apabila si pewaris sudah mempunyai ahli waris, tidak perlu si pewaris membuat wasiat atau *testament erfstelling*, karena secara otomatis ahli waris yang ditinggalkan itu akan menjadi ahli waris berdasarkan Undang-Undang atau *ab intestato* sebagaimana diatur dalam pasal 874 BW yang di dalamnya mengatur mengenai segala harta peninggalan pewaris adalah kepunyaan ahli waris menurut Undang-Undang, kecuali terdapat adanya surat wasiat atau *testament* yang sah dibuat oleh pewaris.

Meskipun dalam Undang-Undang sudah diatur mengenai penggolongan ahli waris serta cara pembagian harta warisan, dalam kehidupan nyata tidak dapat

---

<sup>8</sup> Anisitus Amanat, **Membagi Warisan Berdasarkan Pasal Pasal Hukum Perdata BW**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 99.



kita pungkiri bahwa pewaris mempunyai kehendak dalam memperlakukan hartanya ketika ia meninggal dunia. Pernyataan tersebut dapat pewaris tuangkan dalam sebuah *testament*. Dalam praktek, dengan adanya *testament* dalam hal ini adalah *testament erfstelling* yang dibuat oleh pewaris tidaklah semudah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Dalam hal pengaturan mengenai pengangkatan waris yang mana sudah diatur dalam BW, sejauh ini peneliti tidak menjumpai adanya peraturan lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan dari adanya *testament erfstelling*. Mengingat objek tidak disebutkan secara jelas dalam *testament erfstelling* maka pihak pelaksana wasiatlah atau disebut dengan *executor tetamenter* yang harus berperan dalam proses kalkulasi segala aset yang ditinggalkan oleh pihak pewaris. Namun dalam proses pelaksanaan dari *testament erfstelling* terdapat ketidakpastian hukum mengenai hukum pelaksanaan dari *testament erfstelling*. Hal tersebut terjadi dalam kasus nyata yang Penulis teliti terhadap *testament erfstelling* No. 4 Tanggal 13 Juli 1996, yang dibuat oleh Notaris di Tebing Tinggi, Deli. Dalam *testament* tersebut pewaris menunjuk ahli waris yaitu wanita pertikelir yang bergolongan Tionghoa sebagai ahli waris satu-satunya atas seluruh harta peninggalan pewaris. Ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris merupakan anak angkat dari pewaris. Namun, ketika peristiwa mewaris dibuka, ahli waris yang ditunjuk dalam *testament* tersebut tidak dapat melaksanakan isi dari *testament*, dalam hal ini ahli waris *testamentair* tidak mendapatkan haknya. Berangkat dari adanya *testament erfstelling* tersebut Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan *testament erfstelling* tersebut mengingat kedudukan ahli waris tersebut adalah anak angkat dan ditunjuk sebagai ahli waris

satu-satunya serta akibat hukum apa yang akan terjadi terhadap ahli waris dalam melaksanakan *testament* tersebut.

Sehubungan dengan peristiwa pengangkatan anak, dalam BW tidak ada pengaturan mengenai bagaimana kedudukan anak yang diangkat dalam hal pewarisan karena pada dasarnya memang tidak ada pengaturan tentang pengangkatan anak yang terjadi dalam golongan timur asing Tionghoa, maka dari itu pemerintah Belanda mengeluarkan *Staatblad* 1917 Nomor 129 tentang lembaga pengangkatan anak yang berlaku bagi Golongan Timur Asing Tionghoa yang mana dalam Pasal 5 *Staatblad* tersebut menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya boleh terjadi pada anak laki-laki saja. Namun, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1903, sejalan dengan yurisprudensi tersebut adalah UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam salah satu pasal dari UU tersebut dikatakan bahwa pengangkatan anak harus demi kepentingan kesejahteraan anak yang diadopsi/diangkat.<sup>9</sup>

Dalam contoh nyata yang Penulis teliti terjadi dalam *testament* yang dibuat oleh Notaris di Tebing Tinggi, Deli bernomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 yaitu berisi kehendak seorang pewaris yang dalam *testament*nya berisi *erfstelling*, yaitu si pewaris menunjuk seseorang wanita yang dalam hal ini adalah anak angkat dari pewaris, berjenis kelamin perempuan menjadi satu-satunya ahli waris dan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai jumlah dan jenis harta bendanya, maka dengan begitu notarislah yang menafsirkan bahwa wasiat tersebut termasuk dalam jenis wasiat yang berisi *erfstelling*. Namun, ketika *testament* tersebut di proses, ternyata terdapat beberapa hambatan. Ketika si ahli waris yang diangkat dalam

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

*testament* tersebut mengajukan permohonan balik nama atas harta benda yang ditinggalkan oleh si pewaris, ternyata pihak Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut dengan BPN tidak mengizinkan dan ragu untuk memproses balik nama atas harta benda milik pewaris kepada ahli waris yang diangkat satu-satunya. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari pihak BPN dikarenakan dasar dari perolehan hak tidak jelas karena dalam *testament* tidak tertulis secara spesifik harta benda apa yang diwasiatkan kepada si ahli waris. Padahal dalam peraturan pelaksanaan yaitu PP Nomor 111 tahun 2000 disebutkan bahwa dasar perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah salah satunya dari waris atau hibah wasiat. Penulis menilai bahwa *testament* tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya faktor-faktor lain, tidak hanya mengenai objek dalam *testament* yang tidak jelas, karena pada dasarnya *testament* jenis ini yaitu *erfstelling* sudah diatur dalam BW, namun untuk pelaksanaannya saja yang belum diatur secara rinci oleh Undang-Undang maupun peraturan pemerintah, mengingat dalam UU hanya diatur mengenai salah satu dasar perolehan hak atas tanah bangunan adalah melalui waris dan hibah wasiat, untuk pelaksanaan *testament* yang berjenis *erfstelling* apakah dimasukkan ke dalam peristiwa waris atau hibah wasiat adalah tidak jelas.

Berdasarkan contoh nyata diatas yang terjadi pada akta wasiat yang dibuat oleh Notaris di Tebing Tinggi, Deli Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 maka peneliti menilai bahwa terdapat keraguan dalam Badan Pertanahan Nasional untuk proses balik nama atas obyek berupa tanah dan bangunan milik pewaris kepada ahli waris berdasarkan *testament erfstelling* tersebut diatas. Berangkat dari hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang keabsahan dari *testament erfstelling*

tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi *testament erfstelling* tersebut tidak dapat dilaksanakan . Maka dengan ini peneliti menggagas sebuah penelitian berjudul :

**“TESTAMENT ERFSTELLING PADA ANAK ANGKAT YANG DITUNJUK SEBAGAI AHLI WARIS SATU-SATUNYA (Studi Kasus Surat Wasiat Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 di Tebing Tinggi, Deli)”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Mengapa *testament erfstelling* Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 tidak dapat dilaksanakan dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya *testament erfstelling* tersebut ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis keabsahan *testament* dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dapat dilaksanakannya *testament erfstelling* No 4 Tanggal 13 Juli 1996 yang berisi pengangkatan anak angkat sebagai ahli waris satu-satunya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan manfaat terhadap dunia ilmu pengetahuan hukum waris perdata pada umumnya dan hukum waris berdasarkan *testament erfstelling* pada khususnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab *testament erfstelling* tidak dapat dilaksanakan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat berguna sebagai referensi dan rujukan bahan pembelajaran bagi mahasiswa maupun akademisi hukum yang hendak menyelesaikan tugas akhir
- b. Penelitian ini juga berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya pada hukum waris perdata terkait pelaksanaan *testament erfstelling* serta faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dapat dilaksanakannya *testament erfstelling* yang isinya penunjukkan anak angkat menjadi satu-satunya ahli waris.

#### E. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “**TESTAMENT ERFSTELLING PADA ANAK ANGKAT YANG DITUNJUK SEBAGAI AHLI WARIS SATU-SATUNYA (Studi Kasus Surat Wasiat Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 di Tebing Tinggi, Deli)**” berisikan lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yang disusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang Penulis mengapa peneliti mengangkat judul tersebut, rumusan masalah yang timbul dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II KAJIAN TEORI**

Tinjauan teori atau pustaka ini berisi uraian tentang sistem hukum pewarisan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata, termasuk pengertian pewarisan, dasar hukum mewaris, golongan ahli waris, pewarisan berdasarkan testamen baik yang berisi hibah maupun penunjukan



ahli waris atau *erfstelling*, pewarisan terhadap anak angkat, serta tata cara pemenuhan *testament*, dan pelaksanaan *testament*.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berisi uraian tentang tata cara pelaksanaan penelitian antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, hingga teknik analisis bahan hukum. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah yuridis normatif, dan menggunakan metode pendekatan peraturan hukum tertulis dan kasus.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab pembahasan ini akan menjelaskan hasil dari analisis peneliti terkait pelaksanaan *testament erfstelling* pada anak angkat yang ditunjuk satu-satunya sebagai ahli waris serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi bisa tidaknya *testament* tersebut dapat dilaksanakan.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini peneliti membuat kesimpulan dari penelitian hukum setelah dilakukan analisa bahan hukum serta saran yang bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum waris perdata.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Tentang Sistem Kewarisan di Indonesia

Komposisi masyarakat Indonesia yang majemuk tidak dapat kita pungkiri dari sejak dahulu kala. Sehingga dalam hal hukum perdata terutama dalam peraturan kewarisan di Indonesia sangat sulit untuk membentuk suatu unifikasi hukum waris bagi setiap golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa “ bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang bidang yang bersifat netral seperti hukum perseroan, hukum kontrak, dan hukum lalu lintas”.<sup>10</sup> Dengan demikian, bidang hukum waris ini menurut kriteria Mochtar Kusumaatmadja , “ termasuk bidang hukum yang megandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi komplikasi kultural, keagamaan , dan sosiologi.”<sup>11</sup>

Terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Ketiga sistem hukum waris tersebut adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Hal tersebut berdasarkan tiga penggolongan penduduk yang mana pemberlakuan hukum bagi golongan tersebut diatur dalam pasal 131 *Indische Staatregeling*. Tiga golongan tersbut beserta pemberlakuan hukumnya ialah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Hukum , **Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional** dalam Eman Suparman, **Hukum Waris Indonesia**, Bandung: PT Refika Aditamna , 2014, hlm. 7.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

- a. Golongan Eropa yaitu terdiri dari orang-orang Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, termasuk dalamnya Jepang, Amerika, Australia, dan Kanada yang mana hukum yang berlaku bagi golongan ini adalah hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) berdasarkan asas konkordansi.
- b. Golongan Timur Asing yaitu Tionghoa, Arab, India, Pakistan, Muangthai, dan lain lain yang mana hukum yang berlaku adalah hukum adat masing-masing. Dalam perkembangannya golongan ini dibagi lagi menjadi golongan timur asing Tiong Hoa dan golongan Timur Asing bukan Tiong Hoa. Sehingga berdasarkan *Staatblad* 1917 No 129 , *Burgerlijk Wetboek* dan *Weboek van Koophandel* berlaku bagi golongan Timur Asing Tiong Hoa kecuali pasal-pasal tertentu dari bagian kedua dan ketiga buku Titel I Tite IV mengenai upacara yang harus mendahului perkawinan dan tentang pencegahan perkawinan.
- c. Golongan Bumi Putera, yaitu orang Indonesia asli yang terdiri dari atas 19 Kukuban Hukum menurut Prof. Van Vollenhoven dan BZn Ter Haar<sup>12</sup>. Bagi golongan ini berdasarkan pasal 131 IS ayat (2) sub b antara lain menyebutkan bahwa hukum yang berlaku bagi golongan Bumi Putera adalah perundang-undangan agama, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan penduduk atau hukum adat.<sup>13</sup>

Berdasarkan penggolongan penduduk di atas dalam prakteknya sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum waris Islam karena

---

<sup>12</sup> Mohd. Idris Ramulyo, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat** dalam Eman Suparman, **Hukum Waris Indonesia**, Bandung: PT Refika Aditamna, 2014, hlm. 1.

<sup>13</sup> Eman Suparman, **Hukum Waris Indonesia**, Bandung: PT Refika Aditamna, 2014, hlm. 3.

mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata.

Dalam sistem hukum waris Islam, satu-satunya sumber tertinggi adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah sunnah rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka.<sup>14</sup> Hukum waris Islam merupakan aturan-aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam sistem kewarisan hukum adat, hukum kewarisan ini beraneka sistemnya karena dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan adatnya. Dalam sistem kewarisan adat dikenal sistem kewarisan matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental.<sup>16</sup>

### 1. Pengertian Hukum Waris Perdata

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>17</sup> Menurut Subekti, meskipun tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, Beliau menyatakan bahwa hukum waris sebagai berikut, dalam hukum Waris Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyaah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>15</sup> Zainudin Ali, **Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33.

<sup>16</sup> Maman Suparman, **Hukum Waris Perdata**, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 5.

<sup>17</sup> Eman Suparman, **Intisari Hukum Waris Indonesia**, Cetakan ke III, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 1.

hak kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan.<sup>18</sup>

Hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal ini berdasarkan *Staatblad* 1917 nomor 12 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).<sup>19</sup>

## 2. Unsur-Unsur dalam Pewarisan Perdata

Terdapat tiga unsur terjadinya pewarisan, yaitu:

- a. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris);
- b. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris);
- c. Adanya harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Dalam peristiwa pewarisan, ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta benda yang ditinggalkan oleh si pewaris melalui dua cara yaitu menurut Undang-Undang (*ab intestato*) dan ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*).<sup>20</sup> Hal tersebut menjadi dasar hukum mewaris.

Adapun menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang

<sup>18</sup> Subekti, **Pokok Pokok Hukum Perdata**, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm, 95-96.

<sup>19</sup> Maman Suparman, *Op.Cit*, hlm. 14.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 22.



berdasarkan pada keturunan.<sup>21</sup> Hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya sehingga dalam hal ini Undang-Undang akan menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut.<sup>22</sup>

#### B. Kajian tentang *Testament* Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* atau BW

Wasiat (*testament*) yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pembuatnya. Penarikan kembali itu (*herroepen*) boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam diam (*stilzwijgend*).<sup>23</sup>

Menurut pasal 875 KUHPerdata wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali. Sedangkan dalam pasal 874 KUHPerdata bahwa segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia pada prinsipnya adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya. Menurut Undang-Undang terhadap hal itu dengan surat wasiat telah diambil suatu ketetapan yang sah.

Suatu wasiat harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain, *testament* merupakan pernyataan mengenai sesuatu

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>22</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 29.

<sup>23</sup> R.Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata. Op.Cit.*, hlm.107.

hal sesudah ia meninggal dunia. Jadi, *testament* baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.<sup>24</sup>

Seseorang dapat membuat wasiat apabila memenuhi syarat-syarat berikut yaitu:

- a. Sudah mencapai usia 18 tahun;
- b. Sudah dewasa;
- c. Sudah menikah.<sup>25</sup>

Hal tersebut diatur dalam pasal 897 BW yaitu anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Disamping itu ketentuan lain yang mengatur sahnyanya suatu *testament* yaitu pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 888 BW

“dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti atau tak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik harus dianggap tidak tertulis”

Pasal 809 BW

“Dua orang atau lebih tidak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka baik untuk menguntungkan pihak ketiga, maupun untuk keuntungan timbal balik”

Pasal 930 BW

“suatu *testament* adalah batal jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat”

Dalam hukum waris, di samping larangan secara umum terdapat larangan yang tidak boleh dimuat dalam *testament*, yakni larangan membuat suatu ketentuan yang menyebabkan *legitime portio* (bagian mutlak para ahli waris) menjadi kurang dari semestinya. Selain pemberian melalui *testament* ada juga

---

<sup>24</sup> P.N.H. Simanjuatak. *Op.Cit.*, hlm.267

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.268

pemberian yang terjadi selama hidup seseorang yang dinamakan hibah biasa atau karunia (giften).<sup>26</sup>

Berdasarkan isi dari *testament*, terdapat dua jenis *testament* sebagaimana telah diatur dalam BW. *Testament* tersebut adalah *testament* yang berisi hibah atau biasa disebut dengan hibah wasiat dan *testament* yang berisi pengangkatan waris atau biasa disebut dengan *testament erfstelling*. *Testament* yang berisi hibah atau hibah wasiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 957 BW yang menyatakan bahwa:

“Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang bergerak atau tak bergerak atau membeikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.”

Sedangkan *testament* yang berisi pengangkatan waris atau disebut dengan *testament erfstelling* sebagaimana diatur dalam Pasal 954 Bw yang menyatakan bahwa:

“wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada orang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia).”

Dari pengertian *testament* tersebut di atas berdasarkan BW dapat disimpulkan bahwa kedua *testament* tersebut jelas berbeda dari segi isi yang dituangkan ke dalam *testament*. Perbedaannya adalah *testament* yang berisi hibah atau hibah wasiat menerangkan kehendak dari pewaris atas kehendaknya atas hartanya secara spesifik dan jelas benda benda tertentu apa saja yang akan diwasiatkan kepada si ahli waris. Sedangkan *testament* yang berisi pengangkatan ahli waris atau disebut dengan *testament erfstelling*, dalam wasiatnya si

---

<sup>26</sup> Ali Afandi, *Op.Cit.*, hlm.16

pewaris tidak menyebutkan kehendaknya dengan jelas mengenai benda benda tertentu apa saja yang akan diwasiatkan kepada ahli waris, melainkan isi *testament* tersebut merupakan pengangkatan seorang ahli waris yang dikehendaki atau ditunjuk oleh pewaris untuk mewarisi atas hartanya baik sebagian atau seluruh dari harta yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Sedangkan persamaan dari kedua hibah wasiat dengan *testament erfstelling* adalah kedua wasiat tersebut merupakan kehendak dari seorang pewaris atas apa yang akan terjadi dengan hartanya dalam bentuk tertulis. Kemudian adanya ahli waris yang dikehendaki dalam wasiat tersebut yaitu orang yang dikehendaki untuk menikmati harta peninggalan dari si pewaris. Terakhir adalah waktu pelaksanaan dari wasiat tersebut adalah ketika si pewaris meninggal dunia, jadi harus ada unsur kematian terlebih dahulu untuk pelaksanaan dari kedua wasiat ini.

### C. Kajian tentang *Testament Erfstelling*

#### 1. *Testament erfstelling*

Seperti yang telah dijelaskan dalam uraian di atas bahwa *testament* merupakan wasiat yang berisi pengangkatan ahli waris yang mana pewaris memberikan kepada seorang atau lebih atas seluruh atau sebagian hartanya. Berdasarkan pasal 876 BW yang menyatakan bahwa:

“segala ketetapan dengan wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum atau atas hak umum atau pula dengan atas hak khusus”

Kata dengan atas hak umum (*order algemene titel*) disini berarti meliputi hak hak (*activa*) maupun kewajiban kewajiban (*passiva*) pewaris dan besarnya meliputi bagian yang sebanding dengan warisan.<sup>27</sup> Dalam hal

---

<sup>27</sup> J. Satrio mengutip Vollmar dalam **Hukum Waris**, Alumni, Bandung: 1992, hlm. 193.

ini isi dari *testament erfstelling* yang menyatakan bahwa orang yang ditunjuk sebagai ahli waris tidak hanya mendapatkan hak atas pemberian berupa sebagian atau seluruh harta dari pewaris, melainkan juga termasuk kewajiban kewajiban dari si pewaris. Pemberian dengan alas hak umum disebut pengangkatan waris atau *erfstelling* dan orang yang mendapat wasiat pengangkatan waris benar benar merupakan ahli waris.<sup>28</sup>

Dari batasan yang dikemukakan oleh Vollmar dapat disimpulkan bahwa suatu *erfstelling* tidak harus meliputi seluruh warisan, asal penunjukan tersebut meliputi seluruh warisan, asal penunjukan tersebut meliputi suatu bagian yang sebanding dengan warisan. Maka kewajiban pewaris yang jatuh pada penerima *erfstelling* meliputi bagian yang sebanding dengan seluruh kewajiban.

## 2. Syarat-syarat *testament erfstelling*

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan *testament erfstellin*. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi syarat formil dan materil. Untuk syarat formil ditinjau dari segi subyek dan obyek. Untuk segi subyeknya, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pembuat wasiat harus sehat akal budi;
- b. Tidak berada di bawah pengampuan, kecuali orang dalam keadaan pailit;
- c. Batas umur minimum minimum bagi orang yang akan membuat wasiat, yaitu sudah berumur 18 tahun;

---

<sup>28</sup> J. Satrio, **Hukum Waris**, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 193.



- d. Larangan membuat wasiat oleh dua orang yang saling menguntungkan atau untuk kepentingan pihak ketiga.<sup>29</sup>

Sedangkan dari segi obyeknya, syarat yang harus dipenuhi adalah :

- a. Pelaksanaan sautu wasiat dimana syarat-syarat harus dimengerti dan tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- b. Sebab palsu dalam surat wasiat, apabila ada harus dianggap tidak tertulis, dan apabila pewaris mengetahui maka wasiat dianggap batal;
- c. Apabila dibuat karena paksaan, tipu, atau muslihat adalah batal.<sup>30</sup>

Syarat materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan *testament erfstelling* adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan, hal ini dilarang (*fidei commis* atau disebut dengan wasiat bersyarat).
- b. Kata kata dalam wasiat cukup jelas, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari isi dan maksud wasiat tersebut.
- c. Larangan bagi anak yang belum dewasa atau telah berumur 18 tahun untuk menghibah wasiaatkan sesuatu guna demi kepentingan wali atau bekas wali, melainkan setelah wali tersebut mengadakan perhitungan tanggung jawabnya atas perwaliannya, kecuali wasiat untuk kepentingan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih menjadi wali atau bekas walinya.

---

<sup>29</sup> Maman Suparman, *Op.Cit*, hlm.114

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.114

- d. Larangan bagi anak yang belum dewasa menghibah wasiatkan sesuatu kepada pengajar mereka, kepada guru yang tinggal serumah dengan mereka, kecuali guna membalas jasa dengan memperhatikan jasa yang telah diperbuat dan terhadap harta kekayaan si penghibah.
- e. Larangan menghibah wasaitkan sesuatu kepada tabib atau dokter yang telah melayani seseorang sewaktu ia menderita sakit sampai akhir hidupnya kecuali, segala ketetapan dalam bentuk hibah wasiat, guna membalas jasa yang telah diberikan, segala ketetapan untuk kepentingan suami atau istri dari orang yang mewariskan, segala ketetapan untuk keuntungan para keluarga sedarah sampai derajat keempat seandainya orang yang mewariskan tidak meninggalkan ahli waris garis lurus.
- f. Larangan bagi notaris yang perantaranya telah dibuat akta wasiat dan para saksi yang menyaksikan pembuatan akta wasiat, tidak diperbolehkan menikmati, mengambil keuntungan sedikitpun dari ketetapan wasiat itu.
- g. Ketetapan waris yang diambil guna keuntungan seorang yang tidak cakap untuk mewaris, adalah batal. Sekalipun ketetapan itu diambilnya bagi nama seorang perantara. Perantara disini adalah bapak dan ibu, anak anak serta keturunan dari anak anak dan istri suami orang yang tidak cakap itu.
- h. Larangan kepada orang-orang tertentu untuk mengambil keuntungan dari surat wasiat:

- 1) Mereka yang telah dihukum karena membunuh orang yang mewariskan.
- 2) Mereka telah menggelapkan membinasakan dan memalsukan surat wasiat.
- 3) Mereka dengan paksa atau kekerasan telah mencegah orang yang mewariskan untuk mengubah, mencabut surat wasiat, sekalipun dilakukan oleh istri atau suami dan anak anak mereka.<sup>31</sup>

### 3. *Isi Testament erfstelling*

Dalam pasal 874 BW menetapkan bahwa kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang dapat menimbulkan salah pengertian. Tetapi yang dimaksud disini dengan kepunyaan “wettelijke erfgenamen” adalah hak para ahli waris *ab intestato*.

Di dalam pasal 847 BW, tersimpul suatu asas penting Hukum Waris yaitu bahwa ketetapan pewarisan berdasarkan Undang-Undang, ketentuan waris *ab intestato* baru berlaku, kalau pewaris, tidak/telah mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalannya, ketetapan mana harus dituangkan dalam bentuk surat wasiat. Dengan kata lain kehendak pewaris didahulukan. Disini nampak bahwa Hukum Waris menurut BW pada dasarnya bersifat hukum yang mengatur, walaupun sebagian kecil daripada ketentuan ketentuannya mempunyai sifat yang memaksa. Selanjutnya orang yang menyimpulkan bahwa orang tidak dapat

---

<sup>31</sup> Maman Suparman, *Op.Cit*, hlm.114-116

mengambil suatu ketetapan secara sah atas harta warisannya , selain melalui surat wasiat.<sup>32</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal *testament erfstelling* seseorang atau lebih bisa menuntut haknya sebagaimana telah tertera dalam isi *testament* yang merupakan penunjukan ahli waris dan berdasarkan ketetapan sah yang terdapat dalam *testament erfstelling*, ahli waris bisa melaksanakan isi dari *testament* tersebut.

#### 4. Unsur-Unsur *Testament erfstelling*

Pertama tama pada dasarnya suatu testamen adalah suatu “akta”, kata mana menunjuk pada syarat, bahwa *testament* harus berbentuk suatu tulisan, sesuatu yang tertulis. Unsur kedua adalah suatu *testament* berisi “pernyataan kehendak”, yang berarti suatu tindakan hukum sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan tindakan atau pernyataan pernyataan dimana tindakan atau pernyataan kehendak satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki.

Unsur yang ketiga adalah “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia”. Berarti bahwa testamen baru berlaku, baru mempunyai efek kalau si pembuat *testament* meninggal dunia.<sup>33</sup>

Unsur yang terakhir adalah dapat dicabut kembali , syarat ini penting , karena syarat inilah yang pada umunya dipakai untuk menetapkan apakah

---

<sup>32</sup> J.G Klassen dan J. Enggens dalam J. Satrio , **Hukum Waris**, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 179.

<sup>33</sup> Kpts. M.A tanggal 16-7-1980 No.1005 K/S.I.P./1979. Menyatakan “ Dalam hibah wasiat selama pemberi wasiat, selama pemberi wasiat masih hidup , penerima wasiat belum menjadi pemilik barang yang bersangkutan, sehingga belum berhak menjual”.

suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain.<sup>34</sup>

Dalam *testament erfstelling* ketiga unsur tersebut diaplikasikan dalam bentuk tertulis sebagaimana unsur yang pertama dalam pembuatan *testament* secara umum. Maka begitu pula dengan *testament erfstelling* dibuat secara tertulis dengan menyatakan kehendaknya atas apa yang akan terjadi dengan hartanya setelah si pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini merupakan isi dari *testament erfstelling* yang isinya selalu menunjuk seorang atau lebih menjadi ahli waris atas sebagian atas seluruh hartanya. Unsur yang terakhir bahwa *testament* dalam jenis apapun dapat dicabut. Hal tersebut juga berlaku bagi *testament erfstelling*.

## 5. Tata Cara Pemenuhan Testament

Pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai kebebasan untuk menentukan siapa yang berhak atas harta yang ditinggalkannya. Pembentuk Undang-Undang mengkhawatirkan kebebasan itu disalahgunakan oleh pewaris sehingga ada pihak-pihak tertentu yang karena hubungannya begitu dekat dengan pewaris menjadi korban. Maka dalam memenuhi perintah pewaris dalam *testament* harus dijaga agar bagian *Legitime Portie* ahli waris tidak terlanggar. Tata caranya adalah sebagai berikut:

- a. Harus dilihat apakah penerima masih cakap untuk menikmati keuntungan dari harta peninggalan pewaris berdasarkan *testament*.

Apabila tidak cakap, maka dalam akta pemisahan dan pembagian

---

<sup>34</sup> J. Satrio, **Hukum Waris**, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 181.



harta peninggalan harta peninggalan almarhum perlu dijelaskan penyebab itu secara khusus dalam suatu klausula.

- b. Apabila penerima testamen ternyata tidak ada halangan untuk menikmati keuntungan dari harta peninggalan pembuat testamen ,berarti testamen semacam inilah yang dapat dilaksanakan. Untuk memenuhi testamen tersebut, pertama tama harus dicari dulu berapa besar bagian besar masing-masing ahli waris legitimaris. Setelah bagian masing-masing ahli waris legitimaris terpenuhi , barulah ditentukan berapa besar bagian *testament* .
- c. Andaikata *testament* berisi pemberian seluruh atau menunjuk sebagai satu-satunya ahli waris atau juga menunjuk sebagai ahli waris saja, maka seluruh sisa harta warisan bersih tersebut diserahkan kepada penerima *testament*.<sup>35</sup>

## 6. Penafsiran Testament

Menafsirkan berarti mencoba untuk mengeti pikiran yang tealh dituangkan dalam wujud kata-kata di dalam testamen. Kata kata sebenarnya tidak lain merupakan tanda-tanda, dengan tanda-tanda mana testateur menyampaikan kehendaknya, pikirannya.<sup>36</sup>

Jadi menafsirkan berarti mencari maksud orang yang menyampaikan , yang tersembunyi dibelakang kata-kata testamen.<sup>37</sup> Kata-kata dalam suatu testamen ditujukan kepada mereka untuk siapa testamen dibuat: jadi kepada pelaksana wasiat atau para ahli waris. Kata-kata tersebut menimbulkan

<sup>35</sup> Anisitus Amanat, *Op.Cit*, hlm. 101-104.

<sup>36</sup> P. Scholten, Handeleiding dalam J.Satrio, **Hukum Waris**, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 187.

<sup>37</sup> E.M .Meyers, dalam J.Satrio, **Hukum Waris**, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 187.

suatu gambaran /pikiran tertentu pada orang-orang yang dituju oleh wasiat tersebut. Gambaran tersebut berbentuk berdasarkan arti kata-kata *testament* menurut bahasa sehari-hari, yang mungkin sekali lain daripada yang dimaksud oleh si pembuat wasiat. Dengan demikian kita mengenal teori penafsiran subjektif dan teori penafsiran objektif.<sup>38</sup>

Karenanya kehendak subjektif si pembuat testamen dibatasi oleh kehendak objektif dari hukum, yang berwujud ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat perbuatan hukum, yang dinamakan perbuatan testamen, untuk sampai pada akibat hukum yang ditentukan Undang-Undang.<sup>39</sup> Dengan demikian penafsiran testamen merupakan tindakan menentukan arti yuridis dan akibat hukum suatu tindakan hukum, yang berupa pembuatan *testament*.<sup>40</sup>

#### D. Kajian tentang Ahli Waris

Ahli waris menurut Eman Superman ialah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan orang yang telah meninggal). Ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Emeliana Krisnawati ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat atau menerima harta warisan.<sup>42</sup> Dalam sistem waris BW, ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris melalui dua cara berikut :

- a. Menurut ketentuan Undang-Undang (*ab intestato*);

---

<sup>38</sup> P.Scholten, *Ibid*.

<sup>39</sup> Hartono Surjopratikoo, *Ibid*. hlm. 18.

<sup>40</sup> J. Enggens, dalam Het Testament, dalam J. Satrio, **Hukum Waris**, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 188.

<sup>41</sup> Eman Superman, *Op.Cit*. dalam Maman Superman, **Hukum Waris Perdata**, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 19.

<sup>42</sup> *Ibid*.

- b. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*).

### 1. Ahli Waris Berdasarkan Undang-Undang

Ahli waris berdasarkan ketentuan Undang-Undang (*ab intestato*) yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan.<sup>43</sup> Hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya sehingga dalam hal ini Undang-Undang akan menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut.<sup>44</sup> Undang-Undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris yaitu istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut Undang-Undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan.<sup>45</sup>

#### a. Golongan Pertama

Kelurga dalam garis lurus ke bawah meliputi anak anak beserta keturunannya, tanpa membedakan jenis kelamin, waktu kelahiran, dari perkawinan pertama atau kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 dimana bagian mereka sama besar dan mewaris kepala demi kepala dan mengenal sistem pergantian.<sup>46</sup>

#### b. Golongan Kedua

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>44</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 29.

<sup>45</sup> Eman Suparman, **Hukum Waris Indonesia**, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 30.

<sup>46</sup> Benjamin Asri dan Thabrani Asri, *Op.cit* dalam Maman Suparman, **Hukum Waris Perdata**, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 26.

Ahli waris golongan kedua, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas meliputi orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya, bila tidak ada suami atau istri dari keturunannya, maka warisan jatuh kepada keluarga sedarah golongan kedua.<sup>47</sup>

c. Golongan Ketiga

Ahli waris golongan ketiga yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, orang tua, saudara-saudara atau keturunan saudara-saudara, maka yang mendapat giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya di dalam garis lurus ke atas yang disebut golongan ketiga.<sup>48</sup>

**2. Ahli Waris Berdasarkan Testament**

Kehendak si pewaris kadangkala tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bertolak dari pandangan tersebut, timbul anggapan bahwa biasanya yang punya kesempatan menjadi penerima wasiat adalah orang terdekat sebagai ahli waris, baru kemudian orang yang diingini oleh pewaris. Sesungguhnya anggapan itu kurang tepat, karena semua pihak punya kesempatan sebagai ahli waris baik keluarga terdekat maupun keluarga jauh bahkan orang yang tidak ada kaitannya dengan keluarga sama sekali.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Maman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 30.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>49</sup> J.G Klassen dan J.E Eggens, Goedeizen en Erfrecht-Hukum Waris disadur oleh kelompok Belajar Eka dalam Maman Suparman, **Hukum Waris Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 23.

### 3. Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata

Dalam BW tidak ada ketentuan tentang lembaga. Untuk memberikan landasan hukum kepada lembaga itu, pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan *Staatsblad 1917 nomor 129*. Namun pengadilan Indonesia tidak memperhatikan *Staatsblad* tersebut dalam menyelesaikan sengketa anak adopsi. Fokus perhatian pengadilan Indonesia adalah adopsi demi kepentingan kesejahteraan anak. Pertimbangan ini bermula dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Oktober 1963 yang kemudian menjadi Yurisprudensi. Sejalan dengan Yurisprudensi itu adalah UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Salah satu pasal dari UU tersebut dikatakan bahwa pengangkatan anak harus demi kepentingan kesejahteraan anak yang diadopsi/diangkat. Andaikata masih ada notaris yang berani menggunakannya kiranya tidak perlu kaget kalau ada akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan yang telah dibuat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata ada sengketa.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Anisitus Amanat, *Op.Cit*, hlm. 44-46.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.<sup>51</sup> Penelitian normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>52</sup> Penelitian ini menyoroti pada implikasi hukum dari keberadaan *testament erfstelling* atau Surat Wasiat Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 yang diurus oleh Notaris di Tebing Tinggi, Deli kepada anak angkat sebagai ahli waris satu-satunya. Selain itu penelitian ini juga akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan wasiat tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penulis.

##### B. Metode Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pertama, pendekatan

---

<sup>51</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 57.

<sup>52</sup> Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 56

perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>53</sup> Dalam hal ini adalah menelaah peraturan mengenai pewarisan khususnya dalam pewarisan berdasarkan *testament erfstelling* yang tertuang dalam Surat Wasiat Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 dan dibuat di Tebing Tinggi, Deli. Kedua adalah pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>54</sup> Kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus terkait keberadaan Surat Wasiat Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 di Tebing Tinggi, Deli dimana peneliti mengkaji keberadaan surat wasiat dari *testament erfstelling* atas kasus tersebut yang mana kemudian ditelaah untuk menemukan bagaimana pelaksanaan dari *testament erfstelling* tersebut. Ketiga adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang mana beranjak pada pandangan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>55</sup> Dalam hal ini peneliti menganalisis konsep dari surat wasiat berdasarkan *testament erfstelling* melalui pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keabsahan dari *testament erfstelling*.

---

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 93

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 134

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 49

### C. Jenis dan Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>56</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengkaji beberapa peraturan mengenai pewarisan berdasarkan wasiat khususnya *testament erfstelling* :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Surat Wasiat Nomor 4 Tertanggal 13 Juli 1996
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
  - e. Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat
  - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  - h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - i. PP No 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
  - j. *Staatblad* 1917 Nomor 129
  - k. SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI No. 2 Tahun 1917

---

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

2. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>57</sup> Bahan hukum sekunder adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi: undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.<sup>58</sup> Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku atau jurnal-jurnal.<sup>59</sup> Selain itu peneliti akan menjadikan hasil wawancara dengan pihak BPN, Notaris, dan Ahli Waris sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang berupa buku literatur, jurnal, produk hukum serta hasil wawancara dalam penelitian ini, semua memiliki hubungan dengan topik penelitian yaitu bagaimana *testament erfstelling* dilaksanakan terhadap anak angkat sebagai ahli waris satu-satunya dengan didasarkan pada studi kasus Surat Wasiat Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 yang dibuat di Tebing Tinggi, Deli.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum yang berjenis normatif ini, penelusuran bahan hukum primer, dan sekunder dapat dilakukan melalui studi kepustakaan maupun bahan-bahan hukum lainnya. Sumber data yang berkaitan dengan penelitian penulis, diperoleh dari data sekunder seperti literatur hukum, hasil-hasil

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, 182.

<sup>58</sup> I Made Pasek Diantha, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 143.

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 183.

penelitian, buku-buku, majalah, jurnal hukum, tesis, makalah, dan sebagainya yang peneliti telusuri pada:

- a. Perpustakaan Umum Kota Malang
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- c. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
- d. Buku-buku, literatur, dan jurnal hukum milik pribadi Penulis

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penulis menggunakan metode teknik analisis bahan hukum dengan cara mengkategorikan secara sistematis lalu dianalisis menggunakan interpretasi sistematis yang meninjau hubungan antara norma dari berbagai peraturan perundang-undangan yang saling bergantung,<sup>60</sup> dengan bahan yang ada pada bahan hukum sekunder. Lalu, penulis memproses seluruh data yang sudah dikumpulkan untuk diklarifikasi, dan dianalisis menggunakan teknik *content analysis* atau analisis isi. Teknik ini merupakan suatu teknik untuk membuat kesimpulan obyektif dan sistematis dalam mengidentifikasi karakter khusus yang terdapat dalam pesan atas bahan hukum tertentu. Bahan hukum yang dimaksud adalah produk surat wasiat Surat Wasiat Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 yang dibuat di Tebing Tinggi, Deli dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pewarisan *testament erfstelling*.

Dalam menganalisis bahan hukum penelitian ini, penulis juga menggunakan interpretasi teleologis, yaitu memaknai aturan hukum serta produk surat wasiat berdasarkan tujuan pembuatannya dan apa yang ingin dicapai dari hal tersebut di masyarakat. Penulis melihat produk surat wasiat yang merupakan bagian dari

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 112.



pewarisan *testament erfstelling*, sebagai kenyataan hukum yang memiliki perbedaan dengan sifat positif hukum sehingga patut dianalisis untuk menemukan kesimpulan penggunaan *testament erfstelling* tersebut yang sesuai dengan hukum serta hubungannya di masyarakat.

#### F. Definisi Konseptual

1. *Testament erfstelling* adalah *testament* dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada orang atau lebih dari seseorang, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia). Mereka yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu disebut waris di bawah *testament*.
2. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat atau menerima harta warisan.
3. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
4. Tidak dapat dilaksanakan adalah bahwa proses balik nama aset yang ada di dalam *testament erfstelling* Surat Wasiat Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996, tidak diizinkan oleh kantor pertanahan karena terdapat kekosongan hukum atas teknis pelaksanaan pewarisan melalui *testament erfstelling* kepada anak angkat sebagai satu-satunya ahli waris.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis Penyebab *Testament Erstelling* No. 4 Tanggal 13 Juli 1996 Tidak Dapat Dilaksanakan

Setelah penelitian mengenai *testament erstelling* No 4 Tanggal 13 Juli 1996 dilaksanakan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan *testament* tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut terbukti bahwa berdasarkan *testament erstelling* tersebut ahli waris tidak dapat melaksanakan proses balik nama atas objek yang terdapat dalam *testament* yang berisi pengangkatan ahli waris atas seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam *Burgerlijk Wetbook* yang selanjutnya disebut dengan BW pasal 954 sudah jelas bahwa *testament erstelling* merupakan *testament* yang berisi pengangkatan waris yang ditunjuk oleh pewaris untuk mewarisi atas seluruh atau sebagian harta dari pewaris, sebagian dalam hal ini berupa setengah, atau sepertiganya. Dalam *testament erstelling* yang diteliti oleh Penulis yang berisi pengangkatan waris atas seluruh harta dari pewaris, dalam *testament* tersebut disebutkan pula kehendak pewaris bahwa ahli waris yang ditunjuk merupakan ahli waris satu-satunya yang juga sebagai pelaksana wasiat atau disebut juga *executor tetamenter*.

Terdapat halangan dalam proses pelaksanaan balik nama atas aset dari pewaris yang diwasiatkan kepada ahli waris, yaitu proses balik nama tidak bisa dilakukan. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari pihak BPN bahwa disebabkan karena isi dari *testament* tidak menyebutkan secara spesifik aset apa

saja yang dikehendaki oleh pewaris untuk yang diwasiatkan kepada ahli waris. Apabila tidak dapat dilaksanakannya wasiat tersebut hanya berdasarkan isi dari wasiat yang tidak jelas, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa *testament* tersebut tidak dapat dilaksanakan, mengingat jenis *testament erfstelling* sudah diatur dalam BW. Namun, sampai saat ini Penulis tidak menemukan peraturan yang secara spesifik mengatur prosedur pelaksanaan secara formil *testament erfstelling* pada anak angkat yang ditunjuk sebagai ahli waris satu satunya. Mengingat mengenai hal adopsi atau pengangkatan anak tidak dikenal dalam BW.

Dalam penelitian ini penulis mendapati bahwa ahli waris yang ditunjuk berdasarkan *testament* tidak dapat melakukan proses balik nama aset sebagaimana wujud dari terlaksanakannya *testament*. Proses balik nama aset yang dimaksud adalah proses peralihan hak milik atas tanah yang merupakan aset dari pewaris yang diwasiatkan kepada ahli waris melalui *testament erfstelling*.

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai faktor faktor yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya *testament erfstelling* No.4 Tanggal 13 Juli 1996, Penulis meninjau beberapa peraturan mengenai hak milik atas tanah dan bangunan beserta proses perolehannya sebagai dasar bahwa hak milik dapat berpindah pada keturunan beserta bagaimana perolehannya. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA terdapat pengaturan yaitu Pasal 20 mengenai hak milik. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa,

*“Hak milik adalah hak turun menurun , terkuat ,dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah , dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”*

Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa hak milik atas tanah yang dimiliki oleh pewaris akan berpindah secara otomatis kepada keturunannya, namun dalam

kasus ini pihak ahli waris bukanlah keturunan sah dari pewaris, ahli waris merupakan ahli waris yang diangkat berdasarkan *testament erfstelling* yang mana status dari ahli waris itu sendiri merupakan anak angkat dari pewaris yang mana pembuktiannya akan dijabarkan pada pembahasan selanjutnya. Karena dasar dari peralihan hak sudah diatur dalam UUPA, maka Penulis menilai bahwa ahli waris berdasarkan peraturan tersebut mempunyai hak untuk memperoleh hak milik atas tanah. Penulis meneliti lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan atas peralihan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan pewarisan. Penulis menemukan Peraturan Pelaksanaan No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu dalam Pasal 42 ayat (3) tentang peralihan hak karena pewarisan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa,

*“Jika penerima warisan terdiri dari satu orang , pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang-orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*

Dalam peraturan tersebut jelas bahwa peralihan hak berdasarkan pewarisan membutuhkan surat tanda bukti ahli waris dalam proses peralihan haknya, namun kita sadari bahwa hal pewarisan dalam praktik tidaklah sederhana. Dalam hal pewarisan sendiri terdapat dua cara yakni, pewarisan berdasarkan Undang-Undang dan pewarisan berdasarkan *testament*. Pewarisan berdasarkan *testament* pun dibedakan menjadi dua jenis yakni *legaat* dan *testament erfstelling* atau pengangkatan ahli waris. Dalam pewarisan berdasarkan *legaat* tidak sama dengan *testament* yang berisi *erfstelling*. Perbedaan dari kedua *testament* ini adalah dalam *legaat*, pewaris berkehendak memberikan suatu barang tertentu baik bergerak atau yang tidak bergerak kepada ahli waris yang dikehendakinya sehingga dalam hal proses balik nama atas hak milik terhadap barang tidak

bergerak seperti tanah dan bangunan menjadi jelas beserta regulasinya pun tentang proses dan pelaksanaannya sudah jelas karena sudah diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan *testament* yang berisi pengangkatan waris atau disebut dengan *erfstelling*, *testament* jenis ini tidak menyebutkan secara spesifik barang tertentu apa saja yang diwariskan kepada ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris, namun pewaris dalam hal ini mengangkat seseorang atau lebih menjadi ahli waris atas seluruh atau sebagian harta pewaris. Karena hal pewarisan yang kompleks, peraturan formil mengenai peralihan hak milik berdasarkan *testament erfstelling* terutama dalam hal ahli waris merupakan anak angkat tidak jelas, terutama mengenai surat tanda bukti ahli waris yang seperti apa jika hal pewarisan tersebut berdasarkan *testament*. Jika *testament* sudah dianggap sebagai tanda bukti ahli waris, dalam hal ini adalah *testament erfstelling* yang mana isinya sudah jelas bahwa dalam *testament* berisi kehendak pewaris mengangkat seorang ahli waris, maka *testament* Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Notaris di Tebing Tinggi, Deli dapat dilaksanakan tanpa adanya halangan. Namun, dalam prakteknya pihak BPN menolak untuk melakukan proses balik nama atas aset yang diberikan pewaris terhadap ahli waris berdasarkan *testament erfstelling*.

Dalam *testament* Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Notaris di Tebing Tinggi, Deli berisi kehendak dari pewaris bahwa si pewaris mencabut dan menghapuskan semua surat wasiat dan surat surat lain yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah pewaris buat sebelum akta tersebut, tidak ada dikecualikan. Pewaris ingin agar semua ahli waris dari pewaris



menghormati dan melaksanakan dengan tulus ikhlas kemauan terakhir pewaris. Kehendak pewaris yakni mengangkat seorang ahli waris satu-satunya yaitu wanita yang namanya Penulis samarkan, merupakan partikelir, di Tebing Tinggi Deli, atas seluruh harta peninggalan pewaris baik yang sekarang telah ada maupun yang akan pewaris peroleh dikemudian hari. Pewaris mengangkat ahli waris tersebut menjadi pelaksana wasiat (*executor testamenter*) untuk menjalankan kemauan terakhir pewaris dengan memberikan segala hak dan kekuasaan yang dapat diberikan kepada ahli waris secara hukum. Dalam isi *testament* tersebut sudah jelas bahwa kehendak dari pewaris adalah mengangkat wanita partikelir tersebut menjadi ahli waris satu-satunya. Maka dari itu apabila pihak BPN menolak untuk melakukan proses balik nama atas aset yang pewaris tinggalkan kepada ahli waris tidak dapat dibenarkan, alasan dari BPN yang menyebutkan bahwa tidak ada aset yang diwasiatkan kepada ahli waris secara spesifik pun juga tidak dapat dibenarkan karena dalam peraturan BW pun *testament* jenis pengangkatan waris atau disebut dengan *erfstelling* sudah di atur. Hanya saja peraturan formil mengenai pelaksanaan *testament erfstelling* dalam hal ahli waris yang merupakan anak angkat masih belum jelas. Dalam peraturan BW Pasal 955 sudah diatur bahwa ahli waris berhak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan memperoleh hak milik atas harta peninggalan dari pewaris. Namun , dalam BW tidak mengatur mengenai peralihan hak karena waris dalam hal ahli waris merupakan anak angkat , karena dalam BW sendiri tidak ada peraturan mengenai anak angkat.

Setelah melakukan penelitian Penulis menilai bahwa alasan BPN menolak untuk melakukan proses balik nama yang dikarenakan oleh tidak disebutkannya

secara spesifik barang tertentu yang diwariskan kepada ahli waris bukanlah suatu alasan yang tepat untuk tidak dapat dilaksanakannya *testament erfstelling* Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Notaris, Susana, SH. Terdapat fakta-fakta yang Penulis temukan ketika melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen berserta unsur unsur dari *testament erfstelling* itu sendiri yang dapat menyebabkan *testament erfstelling* tersebut tidak dapat dilaksanakan. Berikut merupakan fakta-fakta yang Penulis temukan selama melakukan penelitian terhadap *testament erfstelling* Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 yang dibuat oleh Notaris di Tebing Tinggi, Deli.

Di dalam isi *testament erfstelling* Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 yang dibuat oleh Notaris di Tebing Tinggi, Deli, pewaris berkehendak untuk menunjuk wanita partikerlir di Tebing Tinggi, Deli untuk menjadi satu-satunya ahli waris. Dalam wasiat tersebut pewaris berkendak untuk memberikan seluruh harta kekayaannya baik yang ada pada saat ini dan harta yang akan datang. Sudah jelas bahwa isi *testament* tersebut adalah berisi pengangkatan waris yang mana pewaris menunjuk wanita tersebut menjadi ahli waris satu-satunya atas harta pewaris. Setelah Penulis telusuri lebih lanjut atas subjek dan objek yang terdapat dalam wasiat tersebut, Penulis temukan bahwa subjek dalam *testament* baik pewaris dan ahli waris merupakan masyarakat Timur Asing golongan Tionghoa sedangkan objek tidak ditulis secara spesifik oleh si pewaris, sehingga *testament* tersebut digolongkan ke dalam *testament* yang berisi pengangkatan waris bukanlah *testament* yang berisi hibah yang mana isi *testament* menyebutkan objek atau benda tertentu yang diwasiatkan kepada ahli waris. Dalam hal ini notaris dengan

*executor testamenter* yang bertugas untuk memberikan penjelasan dalam menafsirkan dan menginventaris objek kekayaan yang dimaksud dalam *testament*.

Pertama-tama mengenai subjek yang ada dalam *testament* baik pewaris maupun ahli waris adalah penduduk golongan Tionghoa. Hubungan antara pewaris dan ahli waris berdasarkan kartu keluarga dari ahli waris adalah ibu dan anak. Namun, setelah Penulis teliti lebih lanjut terdapat data yang menyatakan bahwa perkawinan pertama dan terakhir yang dilakukan oleh pewaris berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 191/ 1956 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil Kota Besar Malang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1956, sedangkan berdasarkan kartu identitas ahli waris, ahli waris sudah lahir di negeri ini pada tanggal 9 Januari 1947. Data tersebut menunjukkan bahwa ahli waris bukanlah anak kandung dari pewaris karena eksistensi dari ahli waris jauh sudah ada sebelum perkawinan yang pertama dan terakhir pewaris dilakukan, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ahli waris bukanlah anak yang dihasilkan dari perkawinan sah dari pewaris.

Dalam hal pembuatan *testament*, pewaris pada dasarnya mempunyai kehendak atas menentukan apa yang akan terjadi atas harta yang ditinggalkannya yang mana dinyatakan secara tertulis dalam sebuah wasiat atau *testament*. Hal tersebut seperti diungkapkan dalam Pasal 875 BW yang pada intinya adalah mengenai surat wasiat atau *testament* berisi kehendak dari pewaris atas harta yang ditinggalkan dan boleh dicabut kembali. Dalam hal ini perkara diberikan kepada siapapun atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah bebas sesuai kehendak pewaris. Namun, Undang-Undang telah lebih dahulu melindungi hak para ahli waris lainnya dengan adanya *legitime portie* atau hak mutlak yang diberikan

kepada ahli waris agar tetap dapat mewaris apabila ada *testament* yang dibuat oleh pewaris, ahli waris tersebut adalah ahli waris *ab intestato* atau ahli waris berdasarkan Undang-Undang. Penulis telah meneliti bahwa tidak ada ahli waris lain selain ahli waris yang ditunjuk sebagai ahli waris satu-satunya oleh pewaris dan tidak ada lagi harta berupa aktiva dan pasiva dari pewaris selain yang disebutkan dalam akta.

Mengenai objek yang mana seperti sudah Penulis singgung di atas, dari hasil penelitian Penulis harta peninggalan yang merupakan objek dari *testament* yang dibuat oleh pewaris adalah sebuah tanah yang terletak di Kelurahan Pisang Candi, Kota Malang sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 424. Berdasar dari *testament* yang telah dibuat oleh pewaris di hadapan Notaris di Tebing Tinggi Deli, pada tanggal 13 Juli 1996 ahli waris bermaksud untuk menuntut hak mewarisnya sebagaimana di atur dalam Pasal 955 BW yang pada intinya adalah atas dasar surat wasiat atau *testament* yang telah dibuat oleh pewaris, ahli waris berhak mewaris atas harta yang ditinggalkan dan berhak untuk mendapatkan hak milik atas harta peninggalan yang telah ditinggalkan tersebut. Maka berdasarkan Pasal 955 BW, ahli waris berhak mendapatkan hak milik atas tanah yang sebelumnya adalah milik pewaris. Namun, seperti halnya dijabarkan dalam latar belakang penelitian ini bahwa *testament* yang dibuat oleh pewaris tidak dapat dilaksanakan sehingga ahli waris tidak dapat melakukan proses balik nama atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam pembahasan ini Penulis akan mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya *testament erfstelling* tersebut.

### 1. Ditinjau dari Status Pengangkatan Ahli Waris

Kembali kepada subjek dalam *testament erfstelling* yaitu pewaris dan ahli waris. Hubungan antara pewaris dan ahli waris seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga ahli waris adalah ibu dan anak. Namun, berdasarkan fakta pada data yang ada, tanggal perkawinan pewaris yang dikeluarkan oleh pegawai luar bisa pencatatan sipil memiliki perbedaan dengan tanggal kelahiran dari ahli waris yaitu tanggal kelahiran ahli telah ada terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan dari pewaris, maka dapat dipastikan bahwa ahli waris yang ditunjuk sebagai satu-satunya ahli waris tersebut bukanlah anak dari hasil perkawinan sah pewaris melainkan anak yang diangkat pewaris. Hal tersebut bisa menjadi jawaban dari pertanyaan atas eksistensi *testament erfstelling* yang dibuat oleh pewaris. Karena apabila ahli waris merupakan keturunan dari hasil perkawinan sah pewaris, pewaris tidak perlu membuat *testament erfstelling* yang isinya menunjuk ahli waris menjadi ahli waris satu-satunya karena pada dasarnya peristiwa mewaris akan secara alami terjadi meskipun tidak ada *testament* yang dibuat oleh pewaris. Hal tersebut karena sudah diatur terlebih dahulu oleh Undang-Undang mengenai pewarisan berdasarkan golongan-golongan. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak notaris di Malang yang membantu dalam proses balik nama atas pelaksanaan *testament erfstelling* tersebut menyatakan bahwa ahli waris merupakan anak angkat dari pewaris.

Mengingat ahli waris adalah termasuk dalam golongan Tionghoa, pada dasarnya dalam BW tidak mengenal lembaga adopsi, melainkan



dalam BW diatur bahwa pengakuan anak luar kawin yaitu dalam bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai 290 BW. Padahal kita tahu bahwa anak adalah aset terpenting dalam sebuah perkawinan, tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa masyarakat dalam perkawinan mereka tidak bisa mendapatkan anak dikarenakan faktor-faktor tertentu, begitu juga yang terjadi dalam masyarakat golongan Tionghoa. Maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas perlunya lembaga dan aturan pelaksanaan mengenai pengangkatan anak, pemerintah Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan *Staatblad* Nomor 129 yang mengatur masalah adopsi bagi golongan masyarakat Tionghoa (Pasal 5 – Pasal15).<sup>61</sup> Dalam ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Belanda tersebut mengatur mengenai adopsi atau pengangkatan anak pada penduduk golongan Tionghoa yang mana adopsi atau pengangkatan hanya boleh dilakukan terhadap anak berjenis kelamin laki-laki saja. Namun seiring dengan berjalannya waktu berdasarkan yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 29 Mei 1963 No. 917/1963 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta 17 Oktober 1963 No. 588 menyatakan bahwa “pengangkatan anak di kalangan masyarakat Tionghoa di Indonesia tidak lagi terbatas pada pengangkatan anak laki-laki namun telah diperbolehkan juga pengangkatan terhadap anak perempuan”. Sebagaimana juga dinyatakan dalam SEMA No. 2 Tahun 1979 jo. SEMA No. 6 Tahun 1983 terkait dengan yurisprudensi terhadap pengangkatan anak perempuan. Berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas penduduk golongan Tionghoa

---

<sup>61</sup> Soeroso, **Perbandingan Hukum Perdata**, Jakarta : Sinar Grafika, 1999, hlm. 178.

diperbolehkan untuk mengadopsi anak perempuan. Dalam hal ini pengangkatan yang terjadi antara pewaris dan ahli waris bisa dilakukan. Untuk keabsahan pengangkatan anak, sebagaimana diatur dalam SEMA RI No 2 Tahun 1979 sebagaimana telah disempurnakan dalam SEMA RI No. 6 Tahun 1983, bahwa penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak dibutuhkan demi terjaminnya kepastian hukum. Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 10 PP No 54 Tahun 1997 tentang pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Namun, dalam kasus yang terdapat dalam *testament erfstelling* No.4 Tanggal 13 Juli 1996, ahli waris tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya sebagai anak angkat melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan yurisprudensi pengangkatan anak perempuan pada penduduk golongan Tionghoa adalah sah secara hukum. Hanya saja ahli waris tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya sebagai anak angkat pewaris, sehingga *testament erfstelling* yang penulis teliti tetap tidak dapat dilaksanakan. Penulis meneliti lebih lanjut mengenai pengangkatan anak atau adopsi beserta dengan prosedur pengangkatan anak. Khususnya pengangkatan anak dalam adat Tionghoa. Dalam pengertian pengangkatan anak atau adopsi sendiri yaitu berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, Muderiz Muzaini mengemukakan bahwa anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Sedangkan dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam

pengaturan perundang-undangan.<sup>62</sup> Ditinjau dari Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat Penulis simpulkan bahwa terdapat dua cara dalam rangka melakukan pengangkatan anak yaitu dilakukan berdasarkan adat istiadat penduduk setempat dan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini adalah pengangkatan anak dapat juga dilakukan melalui lembaga sosial yang mana pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Mengingat subjek dalam *testament erfstelling* baik pewaris maupun ahli waris adalah penduduk golongan Tionghoa, maka Penulis meneliti tentang bagaimana prosedur pengangkatan anak dalam adat Tionghoa. Penulis menilai hal tersebut berpengaruh terhadap akibat hukum waris anak angkat, sehingga Penulis meneliti bagaimana adat penduduk golongan Tionghoa dalam proses pengangkatan anak.

#### **a. Analisis Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Tionghoa**

Ketentuan mengenai pengangkatan anak dalam penduduk golongan Tionghoa sudah diatur oleh pemerintah Belanda pada tahun 1917 dalam *Staatblad* No. 129. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Belanda karena dalam BW tidak terdapat aturan

---

<sup>62</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Bina Akasara, 1999, hlm.85.

mengenai lembaga pengangkatan anak dan bagaimana tata cara dalam pengangkatan anak, konsep anak angkat pun juga tidak ada dalam BW. Namun, karena pengangkatan anak menjadi kebutuhan bagi masyarakat khususnya golongan Tionghoa, maka dikeluarkanlah ketentuan tersebut. Sama seperti apa yang Penulis jabarkan di atas bahwa dalam *Sataatblad*, proses pengangkatan anak dalam penduduk golongan Tionghoa hanya sebatas pada anak laki-laki saja. Jauh sebelum adanya *Staatblad* tersebut adat masyarakat Tionghoa mengenai pengangkatan anak sudah dilakukan terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau tidak memiliki keturunan laki-laki demi meneruskan eksistensi marga keluarga dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur.<sup>63</sup>

Seiring dengan perkembangan pola hidup masyarakat khususnya golongan Tionghoa, aturan mengenai pengangkatan anak hanya diperbolehkan untuk anak laki-laki saja tidak digunakan lagi. Pengangkatan anak perempuan Tionghoa juga dapat dilakukan pada saat ini berdasarkan yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 29 Mei 1963 No. 917/1963 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta 17 Oktober 1963 No. 588. Namun, ada juga masyarakat Tionghoa yang masih tunduk pada adat lama tentang pengangkatan anak hanya diperbolehkan dalam hal pengangkatan anak laki-laki saja. Berdasarkan

---

<sup>63</sup> Hidayat Z. M., **Masyarakat dan Kebudayaan Tionghoa Indonesia**, Bandung : Tarsito, 1977, hlm. 101-103.

yurisprudensi tersebut Penulis menilai bahwa pengangkatan anak perempuan yang dilakukan oleh pewaris adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan adat masyarakat Tionghoa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada masyarakat Tionghoa peranakan umumnya akan membagikan semua harta secara sama rata terhadap semua anaknya baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak angkat yang diadopsi secara sah. Akan tetapi, pada prakteknya, anak-anak yang sudah kaya biasanya tidak mengambil haknya atau hanya mengambil sebagian, sisanya diberikan kepada saudara kandungnya yang kurang mampu (miskin). Anak angkat yang tidak diadopsi sekalipun, asal dari bayi ikut keluarga tersebut umumnya akan diberikan warisan yang sama dengan anak kandungnya.<sup>64</sup>

Dalam etnis Tionghoa terdapat bermacam-macam rumpun yang mana bahasa dan dialek mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, untuk kebudayaan dan adat antar rumpun adalah hampir sama. Dalam hal ini Penulis meneliti rumpun yang ada dalam masyarakat Etnis Tionghoa secara umum dan secara khusus yang berada di Makassar karena dalam hal ini objek penelitian yang berkaitan adalah masyarakat Tionghoa yang berada di Makassar. Secara umum masyarakat etnis Tionghoa di Makassar berasal dari provinsi Fujian dan

---

<sup>64</sup> Leo Suryadinata, **Negara dan Etnis Tionghoa : Kasus Indonesia**, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2002, hlm. 10



Quan Dong yang mana dari provinsi tersebut terdapat beberapa rumpun bangsa yang berbeda-beda yaitu Hokkian, Hakka, Kanton dan Hainan.

Dari berbagai macam rumpun dalam etnis Tionghoa tersebut di atas masing-masing rumpun dalam masyarakat memiliki adat dan kebudayaan yang berbeda beda yang dibawa dari kampung asli mereka. Terkait hal pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat etnis Tionghoa, secara umum dalam masyarakat etnis Tionghoa memiliki kebudayaan yang sama dalam hal pengangkatan anak beserta aturannya. Dalam masyarakat etnis Tionghoa pengangkatan anak dilakukan terhadap anak dalam kategori sebagai berikut <sup>65</sup>:

- i. Anak yatim piatu yang mana marga atau nama keluarganya dan nama panggilan tidak diketahui, sehingga dalam hal ini anak tersebut secara otomatis mewarisi nama keluarga atau marga dari orang tua yang angkatnya dan orang tua angkat berhak untuk memberikan nama untuk anak tersebut, biasanya anak yang demikian akan tinggal bersama dengan orang tua angkat dan menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat.
- ii. Anak yatim piatu yang mempunyai nama marga.

Dalam hal ini anak yang akan diangkat oleh orang

---

<sup>65</sup> Al Jufri dan Risiko El Windo, **Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Jambi**, Master Thesis Universitas Diponegoro, [eprints.undip.ac.id/24511/](https://eprints.undip.ac.id/24511/), diakses pada tanggal 2 Agustus 2018.

tua angkat sudah mempunyai nama marga dari keluarga kandungnya. Sehingga orang tua angkat tidak perlu memberi nama marganya kepada anak tersebut dan anak tersebut masih mempunyai hak untuk tinggal di lingkungannya sendiri sebelum bersama dengan orang tua angkat.

- iii. Anak yang dikepong atau diasuh. Anak tersebut mempunyai orang tua dan juga mempunyai marga yang didapat dari orang tua kandungnya. Anak tersebut juga masih tinggal dengan orang tua kandung, biasanya dalam hal ini anak asuh tersebut memanggil orang tua angkatnya sebagai keluarga dalam.

Dari berbagai macam anak angkat dalam masyarakat etnis Tionghoa, dapat disimpulkan bahwa subjek dalam penelitian ini yaitu ahli waris yang merupakan anak angkat dari pewaris adalah termasuk dalam kategori pertama yaitu anak angkat yatim piatu yang mana dalam hal ini ahli waris tidak mempunyai nama marga atau nama keluarga. Sehingga, orang tua angkat ahli waris yakni pewaris memberikan nama keluarga atau marga kepada ahli waris serta sesuai dengan keterangan ahli waris bahwa ahli waris selama ini tinggal dengan pewaris selama berada di Kota Makassar.

Sedangkan proses pegangkatan anak dalam adat masyarakat etnis Tionghoa secara umum adalah sama. Dalam adat masyarakat etnis Tionghoa, mengangkat anak adalah jalan terakhir bagi mereka yang tidak dapat menghasilkan anak dalam perkawinan mereka. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk meneruskan generasi dari masing-masing keluarga. Di dalam masyarakat termasuk dalam hal ini etnis Tionghoa tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami istri. Akan tetapi, karena berbagai hal keinginan memperoleh anak dalam perkawinan tidak dapat diwujudkan oleh pasangan suami istri sehingga menimbulkan kecemasan. Oleh karena itu, kemudian dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain dan dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut.<sup>66</sup>

Di dalam masyarakat hukum adat Tionghoa, seharusnya yang masuk dalam preferensi pertama diadopsi adalah keluarga sedarah dari generasi yang tepat dibawah generasi adoptan, seperti anak laki-laki dari seorang saudara laki-laki, kemudian lebih jauh, anak laki-laki dari dari sepupu laki-laki dari paman, karena nantinya anak adopsi dan anak-anak adoptan sendiri akan berada dalam generasi yang sama.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Dessy Balaati, **Prosedur dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia, Lex Privatum**, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm. 138.

<sup>67</sup> Cik Hasan Bisri, **Peradilan Agama di Indonesia**, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 45.

Secara umum tata cara pengangkatan anak dalam adat masyarakat etnis Tionghoa adalah dapat dilakukan dengan cara berikut<sup>68</sup>:

- i. Meletakkan satu meja yang mana disebut dengan *gapanzi* yang di atasnya terdapat teko arak, cangkir, *hiolo*, dan lilin. Seorang yang akan diangkat oleh tua angkat tersebut dibimbing untuk *kowtow* kepada orang tua angkatnya kemudian memberi arak dan makanan sambil mengucapkan kalimat “ayah dan ibu angkat silahkan minum dan makan”. Kemudian orang tua angkat lalu memberi nama kepada anak angkat tersebut.
- ii. Setelah apabila ada orang tua kandung dari anak tersebut memberi celana, ikat pinggang kepada orang tua angkat. Orang tua angkat memberi baju untuk anak angkatnya, dibajunya diletakkan satu jarum yang artinya secara tulus hati mengangkat anak tersebut dan juga terkadang diberi bawang yang bunyinya *chong* yang mana senada dengan *chongming* yang artinya pintar, hal ini dilakukan dengan harapan agar anak angkat tersebut kelak menjadi anak yang pintar.

---

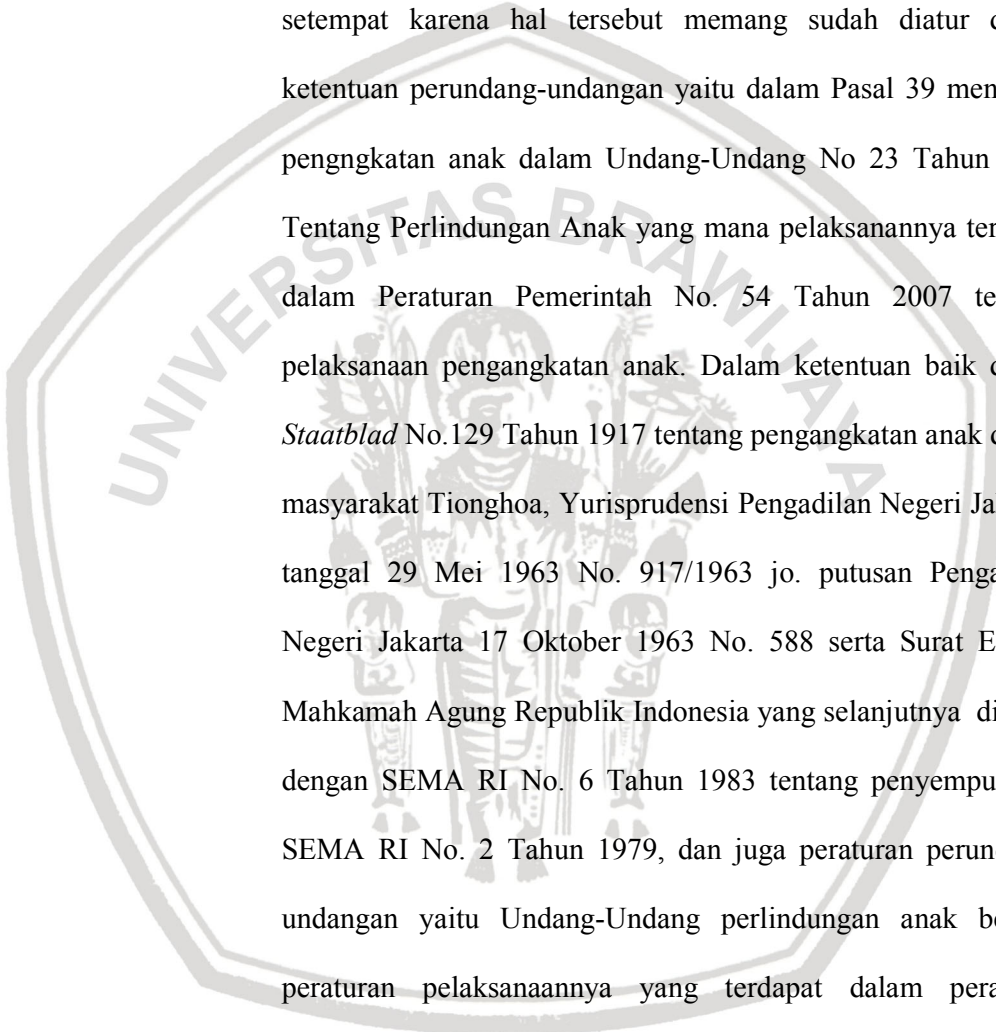
<sup>68</sup> Al Jufri, *Ibid*.

Tujuan dari dilakukannya serangkaian tata cara pengangkatan anak tersebut di atas adalah untuk menjadikan calon anak-anak angkat masyarakat etnis Tionghoa kelak menjadi anak yang pintar dan sehat serta sejahtera. Kegiatan tersebut merupakan adat yang dilakukan oleh masyarakat etnis Tionghoa pada umumnya ketika hendak melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak rumpun dalam masyarakat etnis Tionghoa, namun kebudayaan dan adat istiadat mereka adalah tidak jauh berbeda, bisa dikatakan sama. Hal tersebut tercermin dalam hukum adat mereka bahwa dalam hal pengangkatan anak tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mengangkat anak selain anak laki-laki. Namun, karena perubahan dan perkembangan zaman, serta kebutuhan masyarakat maka berdasarkan yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 29 Mei 1963 No. 917/1963 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta 17 Oktober 1963 No. 588 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No. 2 Tahun 1979, pengaturan mengenai hal pengangkatan anak yang hanya diperbolehkan untuk anak laki-laki saja sudah tidak berlaku. Namun, hal tersebut tidak menghalangi masyarakat etnis Tionghoa yang masih menggunakan adat tersebut, jadi pada saat ini, dalam prakteknya mengangkat anak menjadi anak angkat baik anak



tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan adalah sah menurut hukum.

Setelah pengangkatan anak yang dilakukan secara adat dalam masyarakat etnis Tionghoa dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa apapun dan bagaimanapun adat yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa adalah sah-sah saja berdasarkan adat setempat karena hal tersebut memang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 39 mengenai pengangkatan anak dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam ketentuan baik dalam *Staatblad* No.129 Tahun 1917 tentang pengangkatan anak dalam masyarakat Tionghoa, Yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 29 Mei 1963 No. 917/1963 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta 17 Oktober 1963 No. 588 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No. 2 Tahun 1979, dan juga peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang perlindungan anak beserta peraturan pelaksanaannya yang terdapat dalam peraturan pemerintah No 54 Tahun 2007 dapat digaris bawahi bahwa setiap pengangkatan anak yang dilakukan baik itu oleh masyarakat etnis Tionghoa atau etnis lainnya yang berada di



Indonesia berlaku ketentuan mengenai bukti autentik pengangkatan anak yang dilakukan, bukti autentik tersebut yang sebelumnya harus dinyatakan dalam akta notaris berdasarkan *staatsblad* 1917 No.129 , saat ini berdasarkan SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No. 2 Tahun 1917 dan ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan anak, pengangkatan anak harus dapat dibuktikan dengan adanya penetapan pengadilan setelah segala perosedur baik secara adat maupun ketentuan perundang-undangan dilaksanakan.

**b. Analisis Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Berdasarkan uraian mengenai tata cara pengangkatan anak dalam masyarakat etnis Tionghoa, pada dasarnya cara pengangkatan anak yang dilakukan oleh pewaris terhadap ahli waris adalah sah menurut adat masyarakat Tionghoa. Namun, permasalahannya adalah ahli waris tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah anak angkat yang sah dari pewaris sehingga akibat hukum dalam proses pewarisan tidak dapat dilaksanakan.

Ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak yang mana terdapat dalam Undang-Undang perlindungan anak mempunyai konsep bahwa pengangkatan dilakukan demi kesejahteraan anak dan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan. Namun dalam Undang-Undang

mengenai permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan sebagai bentuk kepastian hukum atas pengangkatan anak tidak diatur secara spesifik apakah kewajiban secara kumulatif atau tidak.

Dalam peraturan pemerintah pengangkatan anak dilakukan dengan dua cara yang pertama dengan adat kebiasaan setempat yang mana dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di masyarakat. Yang kedua adalah pengangkatan anak dapat dilakukan apabila semua syarat pengangkatan anak terpenuhi baik syarat calon anak angkat maupun orang tua. Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi oleh calon anak angkat berdasarkan PP No 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak:

- i. Belum berusia 18 tahun;
- ii. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- iii. Berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak;
- iv. Memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan untuk calon orang tua angkat harus memenuhi syarat berikut:

- i. sehat jasmani dan rohani;
- ii. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
- iii. beragama sama dengan agama calon anak angkat;

- iv. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- v. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- vi. tidak merupakan pasangan sejenis;
- vii. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- viii. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- ix. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- x. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan;
- xi. terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- xii. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- xiii. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- xiv. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Setelah syarat tersebut di atas dipenuhi maka pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara memohon kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak. Dalam hal ini seseorang dapat melakukan pengangkatan anak paling banyak adalah dua kali dalam jangka waktu paling singkat dua tahun. Setelah mendapatkan penetapan

pengadilan tentang pengangkatan anak, barulah pemohon memohon ke instansi terkait dalam hal ini adalah dinas sosial untuk mendapatkan legalitas dari pengangkatan anak dengan wujud berupa akta pengangkatan anak.

Berdasarkan ketentuan mengenai pengangkatan anak di atas dapat diketahui bahwa bukti dari pengangkatan anak bukanlah hanya untuk proses legalitas saja, namun hal tersebut berpengaruh terhadap akibat-akibat hukum lain terhadap anak angkat yang terjadi di kemudian hari. Penulis menilai dengan adanya penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak dan akta pengangkatan anak, hal tersebut dapat dijadikan bukti bahwa benar ada peristiwa pengangkatan anak, sehingga kedudukan hukum anak tersebut menjadi jelas serta akibat hukum dalam hal pewarisan menjadi jelas pula. Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut hak mewaris anak tidak dapat diragukan lagi sehingga proses pelaksanaan pewarisan pun tidak terhambat.

Berbeda dengan kenyataan yang dalam *testament erfstelling* yang Penulis teliti. Hal mengenai ahli waris yang ditunjuk sebagai ahli waris satu-satunya yang mana ahli waris mengaku merupakan anak angkat dari pewaris tidak dapat dibuktikan bahwa ahli waris yang ditunjuk tersebut adalah benar merupakan anak angkat sah dari pewaris. Hal tersebut terjadi karena dalam kenyataannya ahli waris tidak dapat menunjukkan



bukti autentik berupa penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak. Sehingga dalam hal ini berpengaruh terhadap kedudukan hukum dari ahli waris terhadap pewaris. Meskipun dalam bukti autentik lain yaitu kartu keluarga ahli waris disebutkan bahwa hubungan kedua belah pihak adalah ibu dan anak, namun tetap saja hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah. Meskipun dalam Undang-Undang pengangkatan ahli waris dilaksanakan berdasarkan adat setempat diperbolehkan yaitu dalam hal ini adalah adat Tionghoa, namun tetap saja dibutuhkan bukti autentik berupa penetapan pengadilan sebagai bukti autentik dari pelaksanaan pengangkatan anak. Penulis menilai bahwa dengan tidak adanya bukti penetapan pengadilan atas pengangkatan anak ahli waris menyebabkan kedudukan hukum atas ahli waris diragukan, sehingga dalam proses menuntut hak waris menjadi terhambat yaitu hanya berdasarkan *testament erfstelling* yang dibuat oleh pewaris, ahli waris tidak bisa melaksanakan *testament* tersebut. Pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Malang ragu atas kedudukan hukum dari ahli waris. Meskipun kehendak dari pewaris telah dinyatakan dalam *testament erfstelling* yang telah disahkan oleh notaris di Tebing Tinggi Deli, proses balik nama atas harta benda berupa tanah tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya bukti yang menyatakan kebenaran kedudukan ahli waris yang ditunjuk.

## 2. Ditinjau dari Keabsahan *Testament* Berdasarkan Terpenuhiya Prosedur Pembuatan *Testament erfstelling*

Dalam rangka pembuatan *testament* terdapat syarat yang harus dipenuhi dan beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pewaris untuk membuat sebuah pernyataan terakhir yang dinyatakan dalam sebuah *testament*. Berdasarkan *Staatblad* Tahun 1924 No.556 Pasal 4 bahwa golongan timur asing yang bukan Tionghoa dimungkinkan membuat *testament*, tetapi hanya dalam bentuk *testament* umum saja.<sup>69</sup> Berdasarkan ketentuan *staablad* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat golongan Timur Asing Tionghoa dapat membuat *testament* tidak hanya dalam bentuk *openbaar* saja, melainkan bisa dibuat dalam bentuk baik olographis, *openbaar*, ataupun tertutup. Dalam praktik yang Penulis temui yaitu dalam hal ini adalah *testament* berisi *erfstelling* No.4 tanggal 13 Juli 1996 yang dibuat oleh pewaris di hadapan Notaris di Tebing Tinggi, Deli yang mana *testament* tersebut dapat digolongkan ke dalam *testament* umum atau *openbaar*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan dalam komparasi *testament* bahwa pewaris menghadap kepada notaris di Tebing Deli yang dihadiri oleh saksi-saksi dari pihak notaris dalam rangka menyatakan kehendak atas apa yang akan terjadi terhadap harta peninggalannya ketika pewaris meninggal dunia.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Maman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 109.

<sup>70</sup> Lihat Lampiran Wasiat No. 4 Tanggal 13 Juli 1996, hlm. 1.

Dalam hal pembuatan *testament* seorang pewaris haruslah memenuhi persyaratan terlebih dahulu, barulah jika persyaratan telah terpenuhi maka pewaris dapat membuat *testament* dalam bentuk apapun, dalam hal ini secara khusus adalah *testament* berbentuk umum atau *openbaar*. Seperti yang dikatakan oleh Subekti dalam buku Maman Suparman bahwa *testament* yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu boleh secara tegas atau secara diam-diam.<sup>71</sup> Sedangkan dalam BW Pasal 875 menyatakan bahwa suatu *testament* adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *tetament* adalah berisi tentang kehendak dari pewaris atas harta peninggalannya. Sehingga mengenai syarat sahnya untuk membuat sebuah *testament* adalah sama karena pada dasarnya *testament* adalah berisi kehendak pewaris. Syarat yang dimaksud adalah sama seperti yang telah dijabarkan Penulis dalam tinjauan pustaka penelitian ini bahwa syarat dalam pembuatan *testamnet* terbagi menjadi dua yaitu syarat formil yang berkaitan dengan subjek hukum dari pembuat *testament* dan objek yang terdapat dalam *testament* syarat yang

---

<sup>71</sup> R. Subekti, **Pokok Pokok Hukum Perdata**, dalam Maman Suparman, **Hukum Waris Perdata**, Jakarta: 2015, Sinar Grafika, hlm. 105.

kedua adalah syarat materil yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam *testament* yang harus sesuai sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pembuat *testament* harus sudah berusia 18 Tahun, dewasa atau sudah menikah sebagaimana diatur dalam BW pasal 897. Jadi hal pertama yang perlu diperhatikan dalam pembuatan *testament* adalah si pembuat haruslah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Kecakapan tersebut tercermin dalam kedewasaan usia dari si pembuat *testament*, selain itu pembuat *testament* haruslah cakap dalam hal kesehatan akal budinya, dalam hal ini pembuat *testament* tidaklah dalam keadaan sakit pikir, hal tersebut diatur dalam ketentuan BW Pasal 895. Serta pembuat *testament* tidak dalam pengampuan. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat yang mengenai kecakapan untuk membuat *testament* adalah seorang yang tidak cakap tersebut tidak diperbolehkan membuat *testament*. Dalam hal kecakapan pewaris terhadap *testament* yang dibuatnya dapat Penulis lihat dalam penelitian yang Penulis lakukan pada *testament erfstelling* No 4 Tanggal 13 Juli 1996 yang dibuat di hadapan notaris di Tebing Tinggi Deli, bahwa penghadap dalam hal ini adalah pewaris adalah subyek hukum yang sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum berupa membuat *testament* di hadapan notaris tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan identitas pewaris yang menunjukkan bahwa pewaris lahir di tahun 1922 sedangkan proses pembuatan *testament*

*erfstelling* tersebut adalah pada tahun 1996, hal tersebut berarti pewaris sudah mencukupi batas kedewasaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu tidak berusia kurang dari 18 tahun. Serta dengan adanya keterangan di dalam komparasi *testament* bahwa notaris kenal dengan pewaris bahwa pewaris tidak dalam keadaan sakit pikir atau dalam pengampuan. Sehingga pewaris dalam hal ini telah memenuhi syarat formil dari pembuatan *testament erfstelling*.

Mengenai syarat yang berkaitan dengan subjek hukum pembuat *testament* telah terpenuhi, kemudian yang harus dipenuhi dalam membuat *testament* adalah berkaitan dengan objeknya sebagaimana telah diatur dalam BW. Objek yang terdapat dalam *testament* dapat kita lihat di dalam isi dari *testament* itu sendiri yang artinya adalah objek tersebut merupakan kehendak dari pewaris atas harta yang ditinggalkannya. Dalam BW Pasal 888 menyatakan bahwa isi dari *testament* berupa syarat-syarat harus dimengerti dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Hal tersebut mengandung arti bahwa dalam pembuatan *testament* kehendak seorang pembuat pewaris yang dituangkan dalam *testament* mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris yang dikehendakinya haruslah masuk akal dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Kemudian dalam Pasal 890 BW dinyatakan bahwa adanya sebab palsu dalam *testament* dan apabila pihak pembuat *testament* megetahuinya maka *testament* tersebut



dianggap batal. Serta apabila diketahui bahwa sebab pembuatan *testament* adalah berdasarkan paksaan, tipu daya, atau muslihat maka berdasarkan BW Pasal 893, *testament* tersebut adalah batal. Ditinjau dari syarat objek yang harus dipenuhi dalam pembuatan *testament*, objek dari *testament erfstelling* yang Penulis teliti adalah sudah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdara. Mengingat jenis *testament* yang Penulis teliti ini adalah *testament* yang berisi pengangkatan waris atau disebut dengan *testament erfstelling* yang mana dalam *testament* tersebut pewaris berkehendak menunjuk seorang wanita menjadi satu-satunya ahli waris atas segala harta peninggalannya baik yang saat ini ada maupun yang ada di waktu yang akan datang dapat disimpulkan bahwa objek atas *testament erfstelling* tersebut adalah seluruh harta pewaris yang mana tidak bertentangan dengan kesusilaan. Selain itu objek di dalam *testament erfstelling* tersebut dikehendaki oleh pewaris tanpa adanya paksaan atau tipu muslihat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan komparasi *testament* bahwa notaris menerangkan bahwa pewaris datang menghadap kepadanya untuk membuat sebuah *testament* yang mana menurut keterangan yang terdapat dalam *testament* yang menyatakan bahwa pewaris membuat *testament* tersebut atas kemauan pewaris sendiri dan telah mencabut semua wasiat yang pernah ia buat. Hal tersebut terdapat dalam *testament erfstelling* No 4 Tanggal 13 Juli 1996 , yang mana pewaris menyatakan:

“ Saya mencabut dan menghapuskan semua surat wasiat dan surat-surat lain yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah buat sebelum akta ini, tidak ada yang dikecualikan.”<sup>72</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa maksud pewaris untuk menyatakan kehendaknya dalam sebuah *testament* adalah benar adanya kemauan dan kehendak dari pewaris sendiri, bukan karena adanya paksaan, tipu daya, dan muslihat, serta kehendak pewaris tidak melanggar kesusilaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua syarat materil yang berhubungan dengan pembuatan *testament* baik dari segi subjek dan objek telah terpenuhi.

Syarat materil berkaitan dengan isi dari sebuah *testament* yang mana telah diatur dalam BW yang mana berisi tentang hal hal berkaitan dengan larangan-larangan yang diatur dalam BW. Karena larangan-larangan tersebut sudah diatur dalam BW, maka pewaris yang hendak membuat *testament* haruslah mematuhi segala larangan tersebut dengan tidak menuliskan kehendaknya yang sesuai dengan larangan tersebut dalam sebuah *testament* yang akan dibuatnya dalam bentuk apapun. Larangan-larangan tersebut adalah berupa larangan tentang pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan, larangan bagi anak yang belum dewasa menghibah wasiatkan hartanya, larangan untuk menghibahwasiatkan harta peninggalan kepada wali, pengajar, notaris dan juga larangan bagi orang yang belum tidak untuk mengambil keuntungan dari adanya sebuah wasiat atau *testament*.

---

<sup>72</sup> Lihat Lampiran Akta Wasiat No 4 /13 Juli 1996, hlm. 1.

Ditinjau dari syarat materil *testament*, *testament* No. 4 tanggal 13 Juli 1996 yang di buat oleh Notaris di Tebing Tinggi, Deli tidak melanggar larangan-larangan yang telah diatur dalam BW. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan isi dari *testament* tersebut adalah berupa pengangkatan ahli waris satu-satunya yaitu pewaris menunjuk wanita golongan Tionghoa sebagai ahli waris satu-satunya atas seluruh harta dari pewaris. Berdasarkan *testament* tersebut ahli waris mempunyai hak untuk menuntut keuntungan sebagaimana ahli waris Undang-Undang dari adanya *testament* yang dibuat oleh pewaris tersebut berdasarkan Pasal 955 BW. Tuntutan tersebut dapat berupa pemberian atas hak atas seluruh harta yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris.

Setelah Penulis meninjau tentang bagaimana syarat pembuatan *testament*, dapat disimpulkan bahwa dalam membuat *testament* syarat utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah kecakapan dari orang yang membuat *testament* dalam hal ini adalah pewaris. Pewaris haruslah dewasa yang mana ukuran dewasa untuk membuat *testament* adalah umur 18 tahun atau sudah menikah dan tidak dalam keadaan sakit pikir. Apabila syarat kecakapan sudah dipenuhi maka berkaitan dengan kehendak yang akan dituliskan pewaris dalam *testament* adalah tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak dalam sebab palsu, dan kehendaknyapun tidak dituliskan dalam keadaan terpaksa. Kemudian apabila syarat

tersebut terpenuhi syarat materli berupa larangan yang tidak boleh ditulis dalam *testament* harus dipenuhi oleh pewaris.

Setelah segala persyaratan telah dipenuhi langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pembuat *testament* dalam hal ini adalah pewaris adalah tahap penulisan dari kehendak pewaris atas harta peninggalannya yang dilakukan di hadapan notaris. Berdasarkan wawancara dengan Notaris yang ada di Malang, yaitu Notaris Natalia Christiana, SH., Mkn. yang dilakukan oleh Penulis dalam penelitian ini terkait tata cara dalam pembuatan *testament*, khususnya *testament erfstelling* dalam bentuk umum atau *openbaar testament* adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Hal pertama yang harus dilakukan oleh pembuat *testament*, dalam hal ini adalah pewaris, adalah menghadap kepada notaris dan menyampaikan kehendaknya terlebih dahulu maksud dan tujuan dari pewaris datang menghadap kepada notaris. Setelah pewaris menceritakan kehendaknya bahwa ia ingin membuat sebuah *testament*, maka pihak notaris berkewajiban untuk melakukan *checking* secara *online* kepada instansi terkait yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan pengecekan apakah ada *testament* lain yang sudah terdaftar atau belum. Apabila hasil pengecekan tersebut berisi bahwa pewaris tidak pernah membuat *testament* atau tidak ada *testament* yang terdaftar atas nama pewaris, maka langkah selanjutnya notaris mengizinkan pewaris untuk menyatakan

kehendaknya dalam hal tertulis di hadapan notaris. Dalam hal ini pewaris harus disertai dengan minimal dua orang saksi untuk menyatakan kehendak yang akan dituliskannya dalam *testament*. Ketika pewaris menyatakan kehendaknya, disinilah peran dari notaris diperlukan yaitu sebagai penasehat hukum bagi pewaris tersebut dalam rangka membuat *testament* yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik secara formil maupun materil agar tidak terjadi sengketa waris di kemudian hari dan demi terlaksananya isi dari *testament* tersebut. Setelah *testament* dibuat oleh notaris sesuai dengan kehendak pewaris untuk langkah selanjutnya adalah pembacaan ulang yang dilakukan di hadapan pewaris berserta saksi-saksi, menurut ketentuan dalam BW apabila dalam tahap pembacaan akta tidak dihadiri oleh saksi-saksi, maka pewaris harus menerangkan bahwa para saksi tentang maksud dibuatnya *testament*. Kemudian dibacakannya konsep *testament* dengan dihadirinya para saksi, apabila sudah benar maka *testament* ditandatangani oleh pewaris, saksi, dan notaris. Dalam hal apabila pewaris tidak hadir, hal tersebut harus disertakan dalam akta *testament* tentang ketidakhadiran dari pewaris beserta penyebab ketidakhadirannya.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari prosedur pembuatan *testament*, *testament* No. 4 Tanggal 13 Juli 1996 yang dibuat oleh pewaris di

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Endah Lestari, Pegawai Notaris Natalia Christiana, SH.,Mkn pada tanggal 14 Mei 2018



hadapan Notaris di Tebing Tinggi tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur pembuatan *testament erfstelling* sebagaimana yang telah dijabarkan dalam hasil wawancara dengan pihak notaris Natalia Christiana, SH., M.Kn. Hal tersebut mempengaruhi tidak dapat dilaksanakannya *testament*. Hal tersebut terbukti dalam bentuk formil *testament* tidak terdapat saksi-saksi atas *openbaar testament* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah berbagai penjabaran di atas mengenai tidak dapat dilaksanakannya *testament erfstelling* No 4 Tanggal 13 Juli 1996, yang dibuat oleh Notaris di Tebing Tinggi, Deli, selain ditinjau dari hubungan hukum ahli waris dengan pewaris yang tidak dapat dibuktikan secara autentik dengan adanya penetapan pengadilan, terdapat fakta bahwa *testament erfstelling* sendiri yang dibuat oleh pewaris di hadapan notaris di Tebing Tinggi Deli tidak didaftarkan kepada instansi yang terkait. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berlaku ketentuan bahwa dalam membuat *testament* diharuskan untuk mendaftarkan *testament* yang dibuat tersebut kepada Kementrian Hukum dan HAM. Maka dari itu ketika terbukanya warisan yang disebabkan oleh kematian dari pewaris, pihak notaris melakukan pengecekan terhadap *testament* yang dikeluarkan oleh pewaris untuk dibukanya *testament* tersebut oleh instansi yang berwenang yaitu Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara. Berdasarkan laporan yang diberikan oleh

kementrian tertanggal 25 Januari 2018 Nomor AHU.2-AH.04.01-600 bahwa *testament* No. 4 tanggal 13 juli 1996 atas nama pewaris tidak terdaftar. Berdasarkan Reglemen tentang jabatan notaris (S.1860-3) Pasal 36a memuat ketentuan,

*“Notaris diwajibkan mengirimkan daftar kepada balai harta peninggalan tiap bulannya dari semua testament yang dibuatnya dalam bulan yang lalu”*

Dalam peraturan departemen kehakiman pun juga terdapat ketentuan mengenai hal pendaftaran *testament* yang dibuat oleh notaris, hal tersebut terdapat pada *ordonantie* tentang pusat pendapatan *Testament* (S.1920-568) dalam pasal 1 dan 2 bahwa pada Departemen kehakiman terdapat surat wasiat dan Daftar Surat Wasiat ini disusun dari formulir-formulir yang dikemukakan oleh balai harta peninggalan. Selain itu berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 16 angka 1 huruf i menyebutkan bahwa,

*“membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta tiap bulan”*

Dalam hal pembuatan *testament* yang berbentuk *open baar testament* atau dapat disebut juga surat wasiat umum yang mana pewaris menghadap pada notaris untuk menyatakan kehendaknya dalam sebuah akta, hal tersebut berkaitan erat dengan fungsi dari instansi Balai Harta Peninggalan yang mana sudah didirikan jauh sebelum kemerdekaan. Pada tanggal 1 Oktober 1924 Balai Harta Peninggalan pertama didirikan di Jakarta yang mana mempunyai

fungsi membuat surat keterangan hak mewaris, mendaftarkan wasiat yang sudah terbuka, membuka wasiat yang tertutup, mengadakan pemecahan dan pembagian waris (*boedel scheiding*) dan terkait dengan fungsi notaris, Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya disebut dengan BHP berfungsi sebagai tempat pendaftaran *testament* yang sudah terbuka atau ketika pewaris sudah meninggal dunia dalam hal ini memenuhi asas publisitas.

Berdasarkan ketentuan Ordonansi Pusat Wasiat atau *ordinantie op het central testamenten register* S.1920-305 jo. 1921-568 (mb.1 Jan 1922), (Ord.15 April 1920), BW, UU No. 2 Tahun 2014 atas perubahan UU No 30 Tahun 2004 tentang UUPJ, pasal 41-42 OV bahwa ketika seseorang hendak membuat *testament* di hadapan notaris, ketika akta *testament* tersebut sudah diberi nomor dan sudah ditandatangani oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi, pihak notaris berkewajiban untuk mendaftarkan *testament* tersebut kepada Daftar Pusat Wasiat yang selanjutnya disebut dengan DPW yang kemudian diberikan surat tembusan kepada BHP yang nantinya akan dimasukkan ke dalam buku register, sehingga ketika pewaris meninggal, pihak notaris melaporkan kepada BHP bahwa warisan telah dibuka, sehingga wasiat yang sudah terdaftar tersebut dibuka oleh BHP dan bisa dilaksanakan. Namun, dalam praktek, tidak semua notaris melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam UUPJ. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kasus nyata yang Penulis teliti bahwa

*testament* No. 4 Tanggal 13 Juli 1996 yang dibuat oleh Notaris di Tebing Tinggi, Deli tidak terdaftar dalam register BHP. Hal tersebut berpengaruh terhadap kepastian hukum atas kekuatan pembuktian *testament* yang telah dibuat. Terdapat akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat tidak didaftarkannya *testament* tersebut, yang pertama terdapat sanksi yang ditujukan kepada pihak notaris karena dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UUN pasal 16 ayat (1) huruf i yang mana sanksi dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian akibat hukum yang ditimbulkan terhadap *testament* itu sendiri adalah terdapat degradasi kekuatan pembuktian atas *testament* yang telah dibuat, karena mengingat pada dasarnya setiap orang dapat membuat *testament* baik dalam bentuk akta autentik maupun di bawah tangan, jika *testament* dinyatakan dalam bentuk akta autentik hal tersebut haruslah didaftarkan terlebih dahulu kepada BHP untuk dimasukkan dalam buku register, hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya *testament* ganda atau pemalsuan *testament* sehingga menimbulkan sengketa dikemudian hari, serta kepastian hukum dan kekuatan pembuktian pun juga terjamin. Sehingga jika terdapat *testament* yang dibuat di hadapan notaris namun pihak notaris tidak mendaftarkan *testament* tersebut kepada BHP maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik tersebut

sama dengan akta *testament* di bawah tangan yang mana bisa dijadikan dasar gugatan oleh para ahli waris.

**B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Dapat Dilaksanakannya *Testament Erfsteling* No.4 Tanggal 13 Juli 1996 Pada Anak Angkat yang Ditunjuk Sebagai Ahli Waris Satu-Satunya**

Setiap orang mempunyai kehendak atas harta ketika ia hidup di dunia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap orang juga pasti akan meninggalkan dunia. Mengenai segala sesuatu yang ditinggalkannya ketika meninggal dunia, jauh sebelum kemerdekaan, Pemerintah Belanda sudah mengatur mengenai warisan. Peraturan mengenai harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang ketika meninggal dunia tersebut dapat kita jumpai pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dalam bahasa Belanda adalah *Burgerlijk Wetboek*, yang selanjutnya disebut dengan BW. Dalam BW harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang ketika meninggal dunia disebut dengan harta warisan sedangkan orang yang ditinggalkan untuk menikmati harta warisan tersebut disebut dengan ahli waris, dan orang-orang meninggalkan harta benda tersebut adalah pewaris. Ketentuan mengenai bagaimana pembagian harta warisan telah diatur secara rinci dalam BW yaitu terdapat pada Pasal 830 – 1125.

Hukum kewarisan yang diatur dalam BW diberlakukan bagi golongan orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang tersebut. Hal tersebut berdasarkan *Staadblad* 1917 Nomor 12 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula



menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam BW.<sup>74</sup> Berdasarkan landasan hukum tersebut di atas mengenai pemberlakuan hukum pewarisan dalam BW, maka setiap orang yang menundukan diri atas BW berlaku segala ketentuan dalam BW terhadap orang tersebut termasuk dalam hukum kewarisan. Salah satu penundukan diri tersebut bisa terjadi dalam golongan penduduk apa saja, baik golongan Timur Asing maupun Bumi Putera. Bagi mereka yang menundukkan diri diberlakukan pada mereka hukum Eropa dalam *Staatblad* 1917 No.12 jo.,S.1926 No.30, bagi mereka juga diberlakukan kodifikasi Hukum Eropa yaitu *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek Koophandel* yaitu mengenai hukum keluarga dan hukum kewarisan *ab intestato*<sup>75</sup> pada tahun 1855 berdasarkan *Staatblad* 1855 No.79. Seiring dengan berkembangnya waktu Golongan Timur Asing digolongkan kembali menjadi golongan Timur Asing Tionghoa dan yang bukan Tionghoa. Pemberlakuan hukum bagi golongan Timur Asing Tionghoa adalah berdasarkan *staatblad* 1917 No.129 jo. *Staatblad* 1924 No.557 jo. *Staatblad* 1925 No.29 bahwa *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek Koophandel*, berlaku kecuali pasal-pasal tertentu dari bagian Kedua dan Ketiga Buku I Titel IV mengenai perkawinan dan pencegahan perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai hukum pewarisan terhadap golongan Timur Asing Tionghoa berlaku ketentuan dalam BW secara menyeluruh baik mengenai pewarisan *ab intestato* maupun pewarisan berdasarkan *testamentair*. Sehingga dalam hal ini hukum kewarisan yang diatur di dalam BW berlaku bagi golongan Eropa, golongan Timur Asing Tionghoa dan bagi golongan apapun yang menundukkan diri berdasarkan *Staatblad* 1917 No. 12.

<sup>74</sup> Maman Suparman, **Op.Cit.**, hlm.14.

<sup>75</sup> Suparpan Usman dalam Maman Suparman, **Hukum Waris Perdata**, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 2.

Hukum kewarisan yang diatur di dalam BW meliputi kewarisan berdasarkan *testamentair* adalah kewarisan berdasarkan surat wasiat atau *testament* dan juga berdasarkan *ab intestato* yaitu dalam hal seseorang yang meninggal dunia atau dalam hal ini adalah pewaris tidak meninggalkan *testament*. Dalam hal pewarisan berdasarkan *testament*, pemerintah Belanda membagi *testament* berdasarkan isinya menjadi dua yaitu *testament* yang berisi hibah dan *testament* yang berisi pengangkatan waris. Dalam bahasa Belanda *testament* yang berisi hibah disebut dengan *legaat* sedangkan *testament* yang berisi pengangkatan waris adalah *testament erfstelling*. Seperti yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka penelitian ini bahwa *testament* berisi hibah di dalamnya terdapat kehendak pewaris berupa penunjukkan benda benda tertentu yang akan diberikan kepada ahli waris yang dikehendaknya setelah ia meninggal dunia. Sedangkan *testament* berisi *erfstelling* atau pengangkatan waris berisi kehendak pewaris atas penunjukkan seseorang, dalam hal ini ia mengangkat seseorang yang ia kehendaki menjadi ahli waris atas seluruh harta atau sebagian hartanya ketika ia meninggal dunia. Namun, Penulis dalam penelitian ini fokus kepada *testament* berjenis *erfstelling* yang berisi pengangkatan waris sebagaimana objek penelitian telah dijabarkan oleh Penulis dalam sub-bab rumusan masalah pertama, yaitu *testament erfstelling* pada anak angkat yang ditunjuk sebagai ahli waris satu-satunya.

*Testament erfstelling* sebagaimana terdapat pada Pasal 954-955 BW merupakan *testament* berisi pengangkatan waris yang mana pembuatannya dapat dilakukan dengan cara ditulis sendiri oleh pewaris atau pewaris datang menghadap notaris untuk dibuatkan *testament* jenis ini. Sedangkan untuk bentuknya sama dengan *testament* berisi hibah, *testament erfstelling* dapat

berbentuk olographis yaitu dalam hal *testament* ditulis sendiri oleh pewaris, terbuka atau umum yaitu dengan cara pewaris menghadap kepada notaris untuk membuat *testament*, dan bentuk tertutup atau rahasia yaitu dalam hal ini *testament* tidak harus ditulis oleh pewaris sendiri, namun *testament* ini harus selalu dalam keadaan tertutup dan disegel, dalam penyerahan kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi.

Sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan rumusan masalah bahwa objek dari penelitian ini adalah *testament erfstelling* yang mana penunjukkan subjek hukum dari *testament* tersebut baik pewaris maupun ahli waris adalah masyarakat golongan timur asing Tionghoa, yang mana ahli waris dalam *testmaent erfstelling* tersebut adalah anak angkat yang menjadi satu-satunya ahli waris dari pewaris atas seluruh harta pewaris yang ditinggalkan. Maka dari itu pemberlakuan hukum kewarisan bagi mereka adalah BW berdasarkan *Staadblad* 1917 No. 129 jo. *Staadblad* 1924 No.557 jo. *Staadblad* 1925 No.29.

Dalam hal pengangkatan ahli waris yang mana kedudukan ahli waris adalah anak angkat dari pewaris, dibutuhkan pembuktian terlebih dahulu atas keabsahan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan, namun kenyataannya ahli waris tidak memiliki penetapan pengadilan atas kedudukan hukumnya sebagai anak angkat, sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor tidak dapat dialaksanakannya *testament erfstelling* No.4 Tanggal 13 Juli 1996. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 29 Mei 1963 No. 917/1963 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta 17 Oktober 1963 No. 588 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No. 2 Tahun 1979, dan

juga peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang perlindungan anak beserta peraturan pelaksanaannya yang terdapat dalam peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2007 dapat digaris bawahi bahwa setiap pengangkatan anak yang dilakukan baik itu oleh masyarakat etnis Tionghoa atau etnis lainnya yang berada di Indonesia berlaku ketentuan mengenai bukti autentik pengangkatan anak yang dilakukan, bukti autentik tersebut yang sebelumnya harus dinyatakan dalam akta notaris berdasarkan *Staatblad* 1917 No.129, saat ini berdasarkan SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No. 2 Tahun dan ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan anak, pengangkatan anak harus dapat dibuktikan dengan adanya penetapan pengadilan setelah segala perosedur baik secara adat maupun ketentuan perundang-undangan dilaksanakan.

Selain mengenai hal status pengangkatan anak dalm hal ini adalah subjek yang dijadikan ahli waris dalam *testament erfstelling*, ketentuan mengenai porsi dari jumlah harta yang benda diberikan kepada ahli waris tidak boleh lebih dari kententuan mutlak atau dapat disebut juga *legitime portie* ahli waris lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 914 BW. Namun, mengingat kasus dalam objek penelitian ini ahli waris merupakan ahli waris satu-satunya, maka ketentuan mengenai *legitime portie* sebagaiana diatur dalam BW dapat dikesampingkan. Namun, secara umum tetap dalam hal *testament* jenis apapun dan dalam bentuk apapun pelaksanaan dari *testament* tidak bisa langsung dilaksanakan sebelum diteliti terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, kecuali telah mendapat persetujuan dari semua ahli waris. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya sengketa waris.

Mengenai ketentuan pembuatan *testament erfstelling*, pada dasarnya adalah sama dengan pembuatan *testament* jenis hibah, hanya yang membedakan adalah dalam bentuk apa *testament* tersebut akan dibuat, baik itu bentuk olographis, umum, atau tertutup. Prosedur dari pembuatan ketiga bentuk *testament* telah Penulis jabarkan dalam pembahasan rumusan masalah. Dalam hal ini Penulis fokus pada ketentuan pembuatan *testament* secara umum. Bahwa dalam hal membuat *testament*, baik dalam bentuk olographis, umum, maupun tertutup harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta dibawah tangan berkekuatan sama dengan akta autentik apabila akta tersebut disimpan oleh notaris dan didaftarkan sebagai *testament* olographis kepada instansi terkait yaitu Balai Harta Peninggalan. Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berkewajiban untuk mendaftarkan setiap *testament* yang dibuatnya kepada Balai Harta Peninggalan untuk dimasukkan ke dalam buku register. Namun, sebelum membuat *testament*, notaris melakukan *checking* terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan untuk mengetahui adakah *testament* yang pernah dibuat sebelumnya. Jika semua proses pembuatan *testament* telah selesai, notaris berkewajiban untuk mendaftarkan *testament* yang telah dibuatnya tersebut kepada Balai Harta Peninggalan yang bertujuan untuk menghindari adanya *testament* ganda, selain itu *testament* yang telah tercatat di buku register Balai Harta Peninggalan mempunyai kekuatan hukum sebagai akta autentik sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya dan tidak bisa diganggu gugat sehingga apabila warisan telah terbuka, *testament* tersebut dapat dilaksanakan.



Dari penjabaran di atas mengenai ketentuan tentang bagaimana *testament erfstelling* dibuat dan dapat dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan tidak bisa dilaksankannya *testament erfstelling*, khususnya *testament erfstelling* No.4 Tanggal 13 Juli 1996 yang berisi kehendak pewaris dalam hal menunjuk anak angkat menjadi satu-satunya ahli waris atas seluruh harta peninggalannya. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dapat dilaksanakannya *testament erfstelling* tersebut.

### 1. Kedudukan Hukum Ahli Waris

Setiap ahli waris mempunyai hak untuk menikmati harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris ketika ia meninggal dunia. Seseorang dapat menikmati harta warisan tersebut melalui cara berikut yaitu pertama berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang kedua adalah ditunjuk berdasarkan *testament* atau surat wasiat. Dalam Undang-Undang diatur bahwa ahli waris yang berhak menikmati harta warisan adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris yaitu para keturunan pewaris. Dalam hal ini setiap keturunan ahli waris secara otomatis dapat menikmati harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris ketika kewarisan terbuka yaitu ketika pewaris meninggal dunia. Hak untuk menikmati harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dapat secara langsung dinikmati oleh para ahli waris meski tidak ada surat wasiat atau *testament*. Hak untuk menikmati segala harta peninggalan pewaris tersebut dapat dilakukan oleh ahli waris dengan menunjukkan bukti autentik bahwa mereka ahli waris adalah ahli waris yang sah dari pewaris, hal tersebut dapat

dibuktikan dengan akta autentik yang menerangkan bahwa mereka para ahli waris adalah keturunan yang sah dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Dalam hal adanya *testament*, pada dasarnya pewaris mempunyai kehendak bebas atas apa yang akan dilakukan dengan harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia. Hal tersebut seperti yang dikemukakan Subekti dalam Pokok Pokok Hukum perdata bahwa *testament* merupakan pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Selain itu dalam Pasal 874 BW juga telah diatur mengenai kewarisan bahwa segala harta peninggalan pewaris pada dasarnya adalah milik semua ahli warisnya, terhadap hal tersebut dengan surat wasiat atau *testament* telah diambil sesuatu ketetapan yang sah. Hal tersebut berarti bahwa kedudukan hukum ahli waris yang ditunjuk pewaris dalam *testament* adalah sama dengan ahli waris *ab intestato* dan berhak menikmati harta peninggalan pewaris dengan tetap melindungi hak mutlak dari ahli waris *ab intestato*. Jadi ahli waris yang ditunjuk berdasarkan *testament* atau disebut juga dengan ahli waris testamentair dapat memperjuangkan haknya dengan berdasar kepada *testament* tersebut dengan catatan bahwa ahli waris tersebut dapat membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris *testamentair* yang sah. Namun, yang terjadi di dalam kasus yang penulis teliti yaitu pada *testament* *erfstelling* No,4 Tanggal 13 Juli 1996 ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris dalam *testament* tidak dapat membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris yang sah, dalam hal ini adalah sebagai anak angkat sah, maka kekuatan

pembuktian atas dasar mewaris, yaitu *testament* kurang kuat, sehingga *testament* tersebut tidak dapat dilaksanakan.

## 2. Status Pengangkatan Anak Angkat sebagai Ahli Waris Satu-Satunya

Suatu *testament* yang berisi pengangkatan ahli waris atas seluruh atau sebagian harta peninggalan pewaris bisa terjadi pada masyarakat apa saja dan golongan apapun, dengan menundukkan diri kepada hukum Eropa yaitu dalam hal ini adalah BW berdasarkan *Staatblad* 1917 No.12. Penunjukkan ahli waris dalam *testament* pun merupakan kehendak dari pewaris. Itu artinya pewaris berkehendak bebas atas siapapun yang ditunjuk untuk menikmati harta peninggalannya ketika ia meninggal dunia. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak dari pewaris yang dituangkan dalam *testament*. Dalam hal pewaris tidak menyebutkan barang tertentu di dalam *testament* yang dijadikan objek dalam *testament*, namun hanyalah penunjukkan ahli waris atas seluruh atau sebagian hartanya, hal tersebut menjadikan *testament* tersebut berjenis *erfstelling* dan apabila pewarisan sudah terbuka pelaksanaan atas *testament* tersebut tidaklah semudah *testament* yang berisi hibah pada umumnya. Pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak yang ditunjuk dalam *testament* sebagai pelaksana wasiat atau disebut dengan *eksekutor testamenter* berkewajiban untuk menginventarisasi harta apa saja yang diberikan pewaris kepada ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris dalam *testament*. Penunjukan atas *eksekutor testamenter* adalah kehendak bebas dari pewaris, biasanya

orang ditunjuk oleh pewaris sebagai ahli waris dalam *testament erfstelling* sekaligus merupakan *eksekutor testamenter*, namun ada pula *testament erfstelling* yang menunjuk orang yang berbeda antara ahli waris dan *eksekutor testamenter*.

Ada kalanya bahwa seseorang yang ditunjuk oleh pewaris sebagai ahli waris merupakan anak angkat dari pewaris. Sebagaimana telah dijabarkan dalam objek penelitian mengenai *testament erfstelling* di pembahasan rumusan masalah pertama, dapat kita simpulkan bahwa dalam hal sepasang suami istri yang tidak memiliki keturunan, maka langkah yang dilakukan adalah mengadopsi anak baik melalui adat masing-masing maupun dilakukan melalui lembaga sosial, untuk akibat hukum atas peristiwa hukum pewarisan adalah harta peninggalan akan secara otomatis kepunyaan dari ahli waris mereka, yaitu keturunan mereka. Keturunan dalam hal ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan sah. Maka dalam hal sepasang suami istri yang tidak memiliki keturunan yang dilahirkan dari perkawinan sah mereka, anak angkat dapat dikategorikan sebagai anak sah mereka dan dapat menikmati seluruh harta peninggalan apabila pengangkatan tersebut dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut ketentuan yang berlaku yaitu terdapat dalam UU Perlindungan anak, bahwa seseorang dapat melakukan pengangkatan anak demi kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan berdasarkan adat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demi kepastian hukum atas kedudukan anak angkat tersebut. Berdasarkan

Yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 29 Mei 1963 No. 917/1963 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta 17 Oktober 1963 No. 588 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No. 2 Tahun 1979, dan juga peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang perlindungan anak beserta peraturan pelaksanaannya yang terdapat dalam peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2007, dibutuhkan penetapan pengadilan untuk membuktikan kedudukan hukum anak angkat tersebut, sehingga apabila terjadi peristiwa pewarisan, anak angkat tersebut dapat menikmati harta peninggalan dari orang tuanya meski tanpa adanya *testament erfstelling* dari orang tua atau dalam hal ini adalah pewaris, karena mengingat anak angkat tersebut merupakan ahli waris satu-satunya. Sebaliknya, jika anak angkat tersebut diketahui tidak ada penetapan dari pengadilan, maka hal tersebut berdampak pada akibat hukum yang ditimbulkan dalam hal kewarisan yaitu kepastian kedudukan hukum anak angkat sah tidak diakui sehingga anak angkat tersebut tidak mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan pewaris.

### 3. Tidak Terpenuhinya Prosedur Pembuatan *Testament erfstelling*

*Testament* dapat dibuat dalam bentuk *olographis* yaitu ditulis sendiri oleh pewaris, terbuka atau *openbaar testament*, dan juga tertutup. Bentuk bentuk *testament* tersebut dapat dibuat dalam akta dibawah tangan maupun autentik. Kedua akta di atas adalah sama yaitu

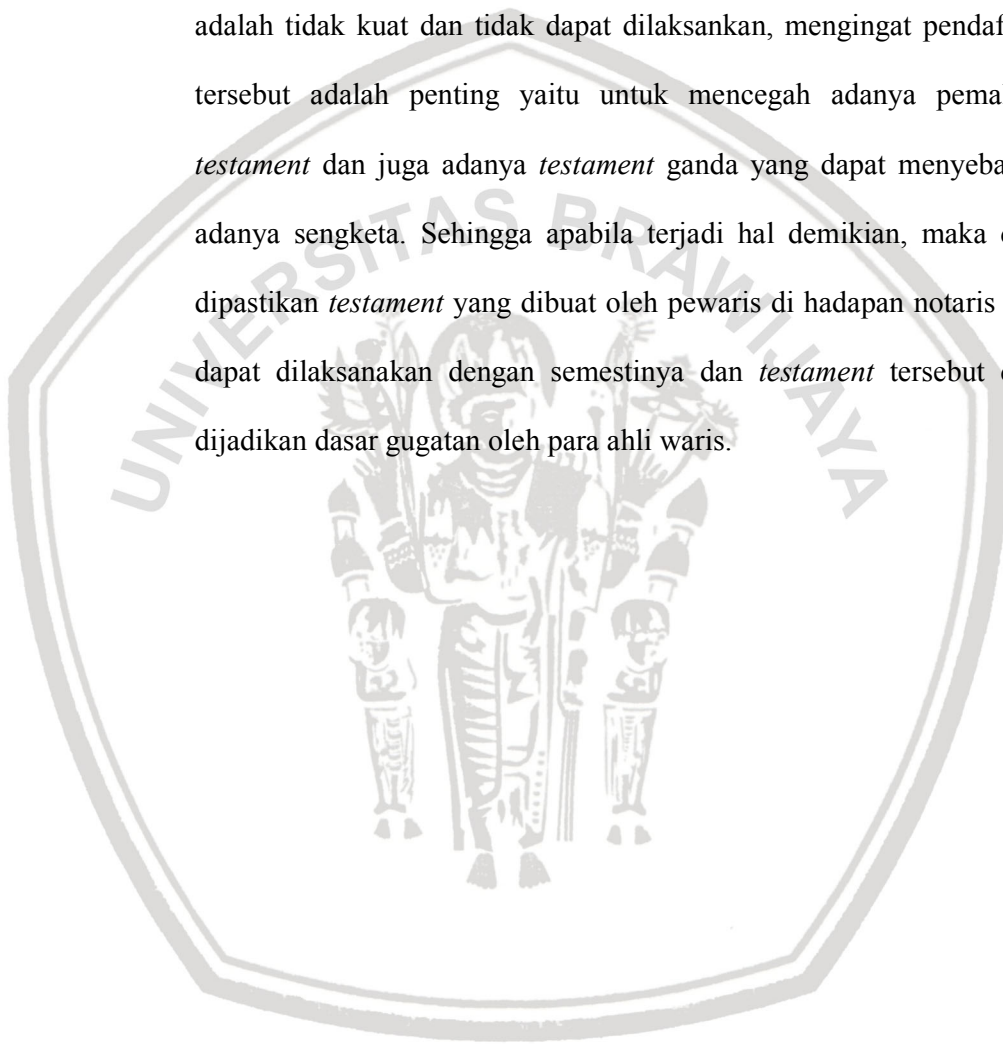


akta yang berisi kehendak sepihak pewaris atas apa yang akan terjadi terhadap hartanya ketika ia meninggal dunia. Pada dasarnya pewaris mempunyai hak untuk membuat *testament* berdasarkan kehendaknya, yang terpenting adalah hal tersebut harus dinyatakan secara tertulis. Pewaris dapat menuliskan kehendaknya atau dalam hal ini adalah *testament* dengan tulisannya sendiri yang mana disebut dengan *testament* bentuk olographis.

Secara umum pembuatan *testament* dapat ditulis dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta autentik. Jika *testament* ditulis dalam bentuk akta di bawah tangan dan didaftarkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk dicatatkan dalam buku register melalui notaris, maka kekuatan akta tersebut memiliki kepastian hukum yang kuat, sebaliknya apabila akta tersebut tidak didaftarkan dalam buku register Balai Harta Peninggalan melalui notaris, maka kekuatan pembuktian atas akta tersebut tidak sekuat akta autentik bahkan akta tersebut dapat dijadikan dasar gugatan oleh para ahli waris. Hal tersebut juga berlaku bagi *testament erfstelling* yang dibuat di hadapan notaris, notaris berkewajiban untuk mendaftarkan segala akta yaitu termasuk *testament* kepada Balai Harta Peninggalan. Hal tersebut merupakan kewajiban dari notaris sebagaimana terdapat dalam UUJN Pasal 16. Seperti pada data bahwa *testament erfstelling* No.4 Tanggal 13 Juli 1996 berdasarkan laporan dari Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.2-AH.04.01-600 bahwa *testament* atas nama pewaris tidak

terdaftar, sehingga faktor inilah yang menyebabkan testament *erfstelling* tidak dapat dilaksanakan.

Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya maka berkakibat hukum berupa sanksi yang diberikan kepada notaris tersebut, serta hal tersebut juga berdampak pada *testament* yang dibuat, kekuatan pembuktian atas akta *testament* adalah tidak kuat dan tidak dapat dilaksanakan, mengingat pendaftaran tersebut adalah penting yaitu untuk mencegah adanya pemalsuan *testament* dan juga adanya *testament* ganda yang dapat menyebabkan adanya sengketa. Sehingga apabila terjadi hal demikian, maka dapat dipastikan *testament* yang dibuat oleh pewaris di hadapan notaris tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya dan *testament* tersebut dapat dijadikan dasar gugatan oleh para ahli waris.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam peristiwa pewarisan di Indonesia, berlaku pluralitas hukum mengingat eksistensi golongan penduduk yang juga banyak. Pluralitas hukum tersebut adalah berlakunya hukum waris perdata, adat, dan Islam. Namun dalam penelitian ini Penulis fokus pada hukum waris perdata yang mana pewarisan dapat terjadi melalui dua cara yaitu berdasarkan Undang-Undang atau yang disebut dengan *ab intestato* dan pewarisan berdasarkan *testatament* atau yang disebut *testamentair*. Dalam hal pewarisan *testamentair* sendiri dalam hukum perdata dibedakan menjadi *testament* yang berisi *legaat* dan *testament* yang berisi *erfstelling* yang peraturan untuk kedua bentuk *testament* tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut dengan *Burgerlijk Wetbook*.

*Testament erfstelling* yang Penulis teliti berisi pengangkatan ahli waris yang ditunjuk sebagai ahli waris satu-satunya. Setelah Penulis teliti dari aspek formil pelaksanaan *testament erfstelling*, penulis menemukan faktor faktor yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya *testament* tersebut. Hal tersebut dikarenakan ketidakjelasan yang kompleks mengenai norma yang mengatur mengenai kasus yang penulis angkat. Sehingga dari segi formil *testament erfstelling* yang penulis teliti tidak dapat dilaksanakan.

## B. Saran

Setelah Penulis meneliti mengenai *testament erfstelling* terdapat beberapa ketidakpastian hukum sehingga hal tersebut menjadi kendala atas pelaksanaan *testament erfstelling*. Permasalahan ada pada bagaimana proses pelaksanaan dari *testament* tersebut, mengingat *testament* tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai spesifikasi barang tertentu yang diwariskan kepada ahli waris, dalam praktik hal tersebut menjadi salah satu kendala bagi instansi, khususnya Badan Pertanahan Nasional yang masih ragu untuk melaksanakan isi *testament* tersebut apabila objek yang akan dibalik namakan adalah berupa tanah. Hal tersebut dikarenakan belum ada peraturan yang jelas dan runtun mengenai proses pelaksanaan *testament erfstelling*, dalam peraturan pelaksanaan mengenai perolehan hak atas tanah adalah terbatas pada peristiwa waris dan hibah wasiat. Selain itu terdapat kekosongan hukum yang mengatur akibat hukum *testament erfstelling* yang tidak terdaftar. Jadi disarankan kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperjelas peraturan serta mengkodifikasi hukum secara runtun mengenai *testament erfstelling* terutama dari segi formil agar tercipta satu pedoman dan menghindari adanya multitafsir dan sengketa yang menyebabkan *testament erfstelling* khususnya pada angkat tidak dapat dilaksanakan

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Anisitus Amanat. **Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW**. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- A. Pitlo. Terjemahan M. Isa. **Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata**. 1917.
- Cik Hasan Bisri. **Peradilan Agama di Indonesia**. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1998.
- Djais, Mochammad. **Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan**. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2006.
- Eman Suparman. **Hukum Waris Indonesia**. Bandung: PT Refika Aditama. 2014.
- Eman Suparman. **Intisari Hukum Waris Indonesia, Cetakan ke III**. Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Heni Tanuwidjaja. **Hukum Waris Menurut BW**. Surabaya: Refika Aditama. 2011.
- Hlman Hadikusuma. **Hukum Waris Adat**. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.
- J. Satrio . **Hukum Waris**. Bandung: Alumni. 1992.
- J. Satrio. **Hukum Keluarga Tentang Kedudukan anak Dalam Undang-Undang**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005.
- Leo Suryadinata. **Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia**. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia. 2002.
- Maman Suparman. **Hukum Waris Perdata**. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Moh Nazir. **Metode Penelitian**. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- Pandika, Rusli. **Tata Cara Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Tionghoa**. Jakarta : Media Aksara. 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum Edisi Revisi**. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2005.
- R. Subekti. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**. Jakarta: Intermasa. 1997.
- Soejono dan H. Abdurahman. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.



Soimin, Soedharjo. **Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak**. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Subekti. **Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke XXXII**. Jakarta: Intermasa. 2005.

Surini dan Nurul. **Hukum Kewarisan Perdata Barat**. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2010.

Zainudin Ali. **Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

#### **Peraturan Perundang Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979

*Staatblad* 1917 Nomor 129

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

#### **Karya Tulis dan Sumber Lain:**

Dessy Balaati, *Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia, Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013

## LAMPIRAN

### Ringkasan Isi Wasiat

Terdapat tiga peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tiga peristiwa tersebut adalah kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ketiga peristiwa tersebut masing masing mengakibatkan akibat hukum yang mana masing masing telah diatur dalam peraturan perundang undangan. Dalam penelitian ini penulis secara khusus membahas salah satu dari peristiwa penting tersebut di atas, yaitu mengenai kematian. Dari peristiwa kematian tersebut dapat diketahui bahwa menimbulkan akibat hukum terhadap setiap orang yang ditinggalkan oleh seseorang yang mati.

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh kematian seseorang adalah sangat erat berkaitan dengan orang yang ditinggalkan dengan segala aset yang ditinggalkan oleh orang mati. Dalam hal ini adalah sekalian ahli waris dengan harta peninggalan. Proses perpindahan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada sekalian ahli waris inilah yang dinamakan proses kewarisan, yang mana ketentuan atas proses tersebut mengalami prulaitas hukum yaitu hukum waris islam , hukum waris perdata , dan hukum waris adat. Dalam penelitian ini penulis fokus kepada hukum waris perdata yang mana penelitian berangkat dari sebuah surat wasiat yang selanjutnya disebut dengan *testament*.

Berangkat dari *testament* yaitu *testament erfstelling* No 4 Tanggal 13 Juli 1996 yang mana berisi kehendak pewaris yaitu menunjuk seorang wanita menjadi pelaksana wasiat atau disebut dengan *executor testamentair* dan ahli waris satu-satunya atas seluruh harta peninggalan. Permasalahan yang timbul adalah mengenai pelaksanaan dari wasiat tersebut yang mengalami hambatan. Hambatan tersebut adalah tidak bisa dilakukannya proses balik nama aset yang terdapat dalam *testament* oleh ahli waris yang ditunjuk dalam *testament*. Maka dari itu penulis meneliti dari berbagai aspek yang menyebabkan hambatan tersebut timbul.

Setelah penulis meneliti, peraturan mengenai *testament erfstelling* telah diatur dalam BW yaitu pasal 954 , namun, penulis tidak menemukan peraturan pelaksanaan yang secara spesifik mengatur mengenai *testament* jenis ini ,

sehingga jika terdapat hambatan seperti yang dialami oleh ahli waris berdasarkan *testament erfstelling* No 4 tanggal 13 Juli 1996, *testament* tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan hambatan tersebut timbul pada *testament erfstelling* No 4 Tanggal 13 Juli 1996. Terdapat fakta fakta yang penulis temukan yaitu dari aspek subjektif yaitu kedudukan hukum ahli waris yang bukan merupakan anak kandung dari pewaris , melainkan anak angkat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan status hubungan keluarga yang terdapat di dalam Kartu Keluarga ahli waris bahwa hubungan antara pewaris dengan ahli waris adalah ibu dan anak , sedangkan berdasarkan *burgerlijke stand (chineezen)* Makassar *akte van geborten* atau disebut dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh De Landrechter te Makassar, Mr.A.J.A. Baron van Westerholt anak tersebut bukanlah anak kandung dari pewaris, sudah jelas kedudukan hukum ahli waris tersebut adalah anak angkat pewaris.

Berdasarkan Yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 29 mei 1963 No. 917/1963 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta 17 Oktober 1963 No. 588 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengna SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No. 2 Tahun 1979 , dan juga peraturan perundang undangan yaitu undang undang perlindungan anak beserta peraturan pelaksanaannya yang terdapat dalam peraturan pemerintah No 54 Tahun 2007 , dibutuhkan penetapan pengadilan untuk membuktikan kedudukan hukum anak angkat tersebut. Namun , ahli waris tidak dapat membuktikan atas kedudukan hukumnya sebagai anak angkat dengan adanya penetapan pengadilan.

Kemudian dari aspek objektif yaitu berkaitan dengan keabsahan dari *testament* itu sendiri yang ternyata pembuatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. Yaitu fakta bahwa di dalam *testament* tidak dicantumkan saksi atas dibuatnya *testament* , padahal berdasarkan pasal 939 BW bahwa untuk bentuk *testament* umum haruslah ditandatangani oleh notaris beserta saksi saksi. Selain itu berdasarkan laporan yang diberikan oleh kementrian tertanggal 25 Januari 2018 nomor AHU.2-AH.04.01-600 bahwa *testament* No 4 tanggal 13 juli 1996 atas nama pewaris tidak terdaftar. Sedangkan UU No 2 Tahun 2014 tentang Undang Undang Jabatan Notaris, Notaris diwajibkan untuk mendaftarkan akta

wasiat yang dibuatnya kepada instansi yang berkaitan dalam hal ini adalah kementrian hukum dan HAM. Hal tersebut berdampak baik pada notaris tersebut maupun *testamet* itu sendiri, dampak bagi *testament* adalah pada kekuatan pembuktian yang mengalami degradasi, sehingga *testament* terebut dapat dijadikan bahan gugatan. Hal tersebut menyebabkan *testament erfstelling* No 4 Tanggal 3 Juli 1996 tidak dapat dilaksanakan oleh ahli waris. Karena *testament* tersebut tidak dapat dijadikan surat tanda bukti ahli waris dalam proses peralihan atas peristiwa pewarisan berdasarkan pasal 42 ayat (3) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

